

Menganalisis Bantuan Australia kepada Timor Lorosa'e

Australia, bersama dengan Jepang dan Portugal, merupakan salah satu dari tiga donor terbesar untuk Timor Lorosa'e sejak 1999. Bantuan pembangunan bilateral pemerintah Australia kepada Timor Lorosa'e disalurkan melalui agen donor resmi Australia yakni AusAID.

Walaupun demikian, Australia juga menyediakan bantuan kepada Timor Lorosa'e melalui saluran-saluran lain:

- √ Sejumlah departemen Pemerintah Nasional Australia secara langsung mendanai proyek tertentu di Timor Lorosa'e (seperti diberikannya para penasehat, pelatih dan sumber daya lainnya dari Departemen Pertahanan Australia kepada Pasukan Pertahanan Timor Lorosa'e (FDTL)). Hal ini tidak dianggap sebagai "bantuan" dan didiskusikan dalam artikel terpisah pada halaman 8.
- √ Pemerintah Australia mengatakan bahwa pihaknya telah menyumbangkan hanya lebih dari 1 miliar dolar AS kepada pasukan penjaga perdamaian multinasional InterFET dan PKF PBB. (Jumlah ini barangkali termasuk gaji dan ongkos perawatan peralatan yang telah dibayarkan bahkan jika tentara Australia tidak diberangkatkan ke Timor Lorosa'e.) Sedikit porsi dari pekerjaan penjagaan perdamaian telah dialokasikan bagi pembangunan keamanan.
- √ Banyak negara Australia dan pemerintah lokal, universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok solidaritas, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga telah memberikan sumbang-sih bagi atau menangani proyek-proyek di Timor Lorosa'e.

Laporan ini difokuskan pada AusAID.

AusAID : Latar-belakang

Australia telah mempunyai suatu agen pemerintah untuk menata bantuan internasionalnya sejak 1974. Pada tahun 1989, badan tersebut pertama kali bekerja di Timor Lorosa'e, agen itu disebut AIDAB. Di tahun 1995 AIDAB diubah menjadi AusAID, Agen Australia untuk Pembangunan Internasional.

Seorang Australia yang bekerja pada suatu proyek AusAID di Timor Lorosa'e dari tahun 1996-1999, Lansell Taudevin, menuliskan bahwa selama pendudukan Indonesia, proyek-proyek AusAID "mencerminkan keinginan Jakarta, bukan permintaan Timor Lorosa'e." Ia mencatat satu contoh ketika Uskup Belo menghendaki program pendidikan dan rekonsiliasi tetapi AusAID mengikuti rekomendasi Jakarta akan persediaan air, pertanian dan bantuan dokter hewan sebagai gantinya. Taudevin mengatakan bahwa AusAID ditekan oleh Kedutaan Australia di Jakarta untuk memberikan laporan-laporan Timor Lorosa'e yang lebih simpatik kepada Indonesia. Kendatipun demikian, Taudevin mencatat bahwa kehadiran AusAID lebih dihargai oleh Timor Lorosa'e sebagai salah satu sumber kontak dengan dunia luar dan oleh karena itu dana berjumlah sekitar 20 juta dolar Australia (sekitar 14 juta dolar AS) antara tahun 1992 dan 1997. Juga, AusAID dapat saja telah diusir keluar dari Timor Lorosa'e jika tidak melakukan konsesi dengan Pemerintah Indonesia.

AusAID mengkontribusikan 20 juta dolar AS bagi proyek-proyek kemanusiaan/darurat di Timor Lorosa'e dari September 1999 hingga Juni 2000. Hampir setengah dari dana ini dialokasikan untuk pemulangan para pengungsi dan program perumahan darurat yang dikoordinir oleh UNHCR; sebagian lainnya juga memberikan dukungan kemanusiaan kepada orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya di dalam Timor Lorosa'e sebelum referendum. Jumlah bantuan AusAID kepada Timor Lorosa'e dari Juli 1999 hingga Juni 2000, termasuk uang untuk PBB dan dana kepercayaan TFET tetapi di luar bantuan kepada warga Timor Lorosa'e yang dievakuasi ke Australia, jumlahnya sebesar 43 juta dolar AS.

(Bersambung ke halaman 2)



Daftar isi . . .

Di TL tentara AS di atas hukum	7
Bantuan militer Australia untuk Timor Lorosa'e	8
Kronologi eksplorasi minyak di laut Timor	10
Kerusuhan 4 Des: Tanggung jawab internasional	14
Surat UNDP dan jawaban <i>La'o Hamutuk</i>	16
Berita singkat	19
Editorial: Demokrasi perlu informasi	20

Tujuan

AusAID berencana untuk menyediakan 80 juta dolar AS dalam rangka membantu Timor Lorosa'e dari bulan Juli 2000 hingga Juni 2004. Jumlah ini meliputi kurang lebih 20 juta dolar AS dari Juli 2002 hingga Juni 2003, jika dibandingkan secara proporsional dengan penduduk Timor Lorosa'e jumlahnya sekitar lebih dari 20 dolar AS per orang. Bagi AusAID, ini merupakan per capita yang tinggi, andaikata dibandingkan dengan tiga puluh juta dolar AS bagi seluruh China dan 70 juta dolar AS bagi seluruh Indonesia dalam periode yang sama. Kendatipun demikian, Australia memberikan kepada Papua New Guinea (yang diperintah oleh Australia hingga menjadi merdeka di tahun 1975) lebih dari dua kali lipat sebanyak bantuan yang diterima oleh Timor Lorosa'e, walaupun bantuan yang tinggi kepada PNG dipandang sebagai masalah bagi banyak kalangan di Australia.

Bantuan luar negeri Australia dari Juli 2001 hingga Juni 2002 jumlahnya mendekati 900 juta dolar AS di seluruh dunia. Jumlah ini mewakili 0,25% dari Gross Domestic Product (GDP) Australia. Bantuan Australia seperti suatu persentase GDP telah menurun secara tetap sejak tahun 1983, ketika persentase tersebut berada pada 0,47%. Hal ini benar-benar berada di bawah baik target 0,7% yang diusulkan oleh PBB maupun rata-rata negara-negara donor, 0,4%. Tidak seperti donor-donor lainnya, Australia tidak berjanji untuk meningkatkan bantuannya di seluruh dunia pada Konferensi Internasional mengenai Dana Pembangunan pada bulan Maret lalu.

Tujuan yang dinyatakan AusAID ialah untuk "memajukan kepentingan nasional Australia dengan cara membantu negara-negara yang sedang berkembang mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan." Tentu saja perkembangan politik dan ekonomi Timor Lorosa'e penting bagi Australia. Karena secara geografis

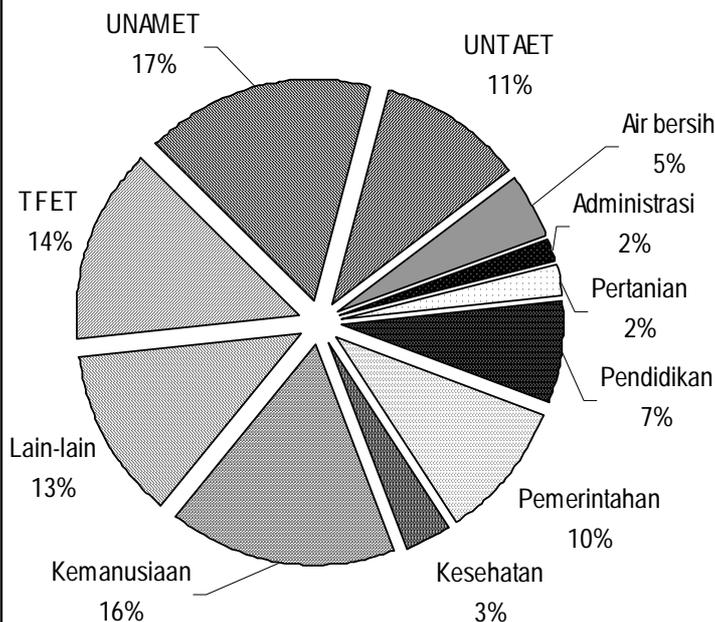
berdekatan dengan Australia, situasi politik yang tidak stabil di Timor Lorosa'e dapat saja menciptakan masalah pengungsian bagi Australia dan ketegangan-ketegangan diplomatik regional seperti yang terjadi di tahun 1975 dan 1999. Suatu ekonomi yang sehat di Timor Lorosa'e, pada gilirannya, menciptakan peluang impor-ekspor bagi bisnis Australia, khususnya jika ekonomi tersebut terbuka bagi investasi Australia. Selanjutnya, bantuan uang tersebut lebih sering secara langsung dialokasikan kepada penyelia atau kontraktor Australia, yang meningkatkan keuntungan mereka dan mempromosikan keterampilan mereka serta produk di dalam pasar luar negeri.

Pemerintah Australia mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sekitar 1 miliar dolar AS bagi operasi InterFET dan PKF PBB di Timor Lorosa'e sejak September 1999, sehingga jumlahnya relatif kecil yang dikeluarkan oleh AusAID di Timor Lorosa'e yang dapat dianggap sebagai cara yang tidak mahal untuk menghindari konflik dan menyelamatkan ongkos militer di masa depan.

Bantuan Australia bagi Timor Lorosa'e dapat juga dimaksudkan untuk menciptakan kehendak baik guna memperkuat posisi Australia di dalam perundingan atas minyak dan gas Celah Timor. Perdana Menteri Australia John Howard kadang-kadang menyebutkan "kemurahan hati" Australia kepada Timor Lorosa'e ketika ia berbicara mengenai negosiasi dengan Timor Lorosa'e atas minyak di Celah Timor. Susunan Pemerintah Australia juga meliputi baik AusAID dan negosiasi minyak di dalam Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan. Bantuan AusAID sebesar 80 juta dolar AS bagi Timor Lorosa'e dalam kurun waktu empat tahun merupakan suatu investasi kecil untuk mendapatkan kembali yang besar: pemerintah Australia berharap mengantongi puluhan miliar dolar dari minyak dan gas dari Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e sebagaimana ditentukan oleh hukum Timor Lorosa'e dan Hukum

Bantuan Australia kepada Timor Lorosa'e dari 1999-2002

Total: 89,000,000 dolar AS



Pemerintahan meliputi CAPET (lihat grafik di samping), gedung parlemen, dan konsultan serta pelatihan bagi pemerintah Timor Lorosa'e.

Kemanusiaan meliputi dukungan kepada pengungsi, orang-orang dipaksa meninggalkan kampung-halamannya di dalam negeri, pangan dan papan darurat.

Lain-lain meliputi Perayaan Hari Kemerdekaan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan kapasitas serta program dukungan LSM yang mendukung berbagai macam sektor.

TFET ialah Dana Kepercayaan bagi Timor Lorosa'e, yang dikelola oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. TFET mengeluarkan dana untuk proyek-proyek di banyak sektor – termasuk 16% untuk kesehatan dan 18% untuk pendidikan. Para pengelola TFET menitik-beratkan perkembangan sektor swasta di bidang pelayanan-pelayanan pemerintah, dan dana tersebut telah dikritik atas ketidak-efektifan dan ketidak-cocokannya untuk proyek-proyek tersebut. (Contohnya lihat *Bulletin LH* Vol. 3 No. 1 mengenai Pusat-pusat Percontohan Pelayanan Pertanian; *Bulletin LH* Vol. 3 No. 7 mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat.) Prioritisasi AusAID mengenai TFET dapat dilihat sebagai dukungan bagi agenda "pemerintah yang kecil" ini, dan karena kurangnya kepercayaan pada pemerintah Timor Lorosa'e menangani uang tersebut seturut keinginan AusAID.

Sejumlah Proyek AusAID yang lebih besar setelah tahap emergensi

Nama proyek	Anggaran (ribuan dolar AS)	Kerangka waktu	Uraian
Proyek Pengembangan Kapasitas bagi Timor Lorosa'e (CAPET)	\$9,0	Mei 2000 s.d. Sep 2002	Dikelola oleh Illawara Technology Corporation (ITC International, suatu cabang perusahaan dari University of Wollongong, Australia). Program ini menyediakan ahli-ahli teknik luar negeri, pelatihan jangka pendek, peralatan dan bantuan lain kepada pemerintah dan masyarakat sipil Timor Lorosa'e. CAPET dan beberapa program lainnya yang dicantumkan di bawah mempekerjakan sebagian besar ahli dan pelatih Australia. Karena gaji orang Australia lebih tinggi dari pada orang Timor Lorosa'e atau orang-orang Asia Timur lainnya, hal ini merupakan cara yang tidak efisien untuk meningkatkan kapasitas orang Timor Lorosa'e, kendatipun menyediakan lapangan kerja dengan pembayaran yang baik kepada orang-orang Australia.
Fasilitas Pengembangan Kapasitas (CBF)	\$9,5	15 Sep 2002 s.d. Sep 2005	Pola kemitraan LSM Australia dengan LSM Timor Lorosa'e dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat lainnya yang bekerja di bidang perdamaian dan rekonsiliasi, HAM, kelompok-kelompok rentan, pemberdayaan perempuan dan pembangunan usaha kecil. CBF dibentuk dari pengalaman SAPET dan meliputi penitik-beratan pada kemitraan dengan Pemerintah Timor Lorosa'e di bidang perencanaan strategis dan memprioritaskan bantuan teknis.
Program Persediaan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	\$7,7	Des 2001 s.d. Des 2004	Menyediakan ahli-ahli persediaan air bersih, pasokan, pelatihan dan pembangunan kesadaran guna membantu masyarakat dan LSM yang membangun persediaan air bersih dan pelayanan sanitasi di Covalima, Bobonaro dan Viqueque. Walaupun perencanaan telah dimulai setahun yang lalu, pelaksanaan proyek tersebut baru dimulai di bulan Oktober 2002.
Proyek Kesehatan Mulut Nasional	\$2,6	2001-2004	Bantuan di bidang kesehatan gigi.
Proyek Kesehatan Mental Nasional	\$1,7	2002-2005	Pelatihan bagi 15 pekerja spesialis kesehatan mental.
Program Dukungan Bedah dan Pembiusan	\$1,6	2002-2005	Para ahli bedah dan pembiusan melakukan operasi dan melatih staff di Rumah Sakit Dili. Pada program lain, Australia juga menyediakan 10 buah ambulance kepada Kementerian Kesehatan dan pelatihan kepada para pengemudi ambulance, perawat dan staff teknis, dan bantuan penanganan HIV/AIDS.
Program Bantuan Staff bagi Timor Lorosa'e (SAPET)	\$2,5	Mar 2000 s.d. Jan 2002	Dikelola oleh Australian Volunteers International (AVI, Sukarelawan Internasional Australia), menyediakan staff untuk membantu pemerintah dan organisasi-organisasi kunci masyarakat sipil. Contohnya guru-guru yang memberikan pelatihan bahasa Inggris pada Akademi Pelayanan Sipil dan Pelayanan Divisi Kesehatan, dan para insinyur dan administrator pada Kantor Persediaan Air Bersih dan Sanitasi.
Beasiswa Pembangunan Australia (ADS)	\$1,6 juta per tahun	2000 - berlanjut	AusAID tengah menyediakan beasiswa kepada 20 pelajar Timor Lorosa'e untuk mulai belajar di Australia setiap tahun. Para penerima beasiswa bisa saja mahasiswa tingkat sarjana muda maupun sarjana, yang belajar tentang bidang-bidang praktis yang berkaitan dengan pembangunan Timor Lorosa'e. Dewasa ini terdapat 92 orang penerima beasiswa di Australia. Jumlah ini jauh lebih rendah dari pada 1.200 mahasiswa Timor Lorosa'e yang tengah belajar di Indonesia (yang dibayar oleh sejumlah donor) dan 314 yang belajar di Portugal (Lihat <i>Bulletin LH</i> Vol. 3, No. 7). Australia memberikan dukungan yang sedikit kepada pendidikan tinggi bagi pengungsi Timor Lorosa'e yang berdiam di Australia. Pada dekade-dekade silam, Australia memberikan lebih banyak beasiswa kepada mahasiswa dari Asia Tenggara.
Skema Bantuan Masyarakat Timor Lorosa'e (ETCAS)	Telah mencairkan dana sekitar \$1,6 juta pada pertengahan Nov 2002	2000 - berlanjut	Dikelola dan dipantau langsung oleh kantor AusAID di Dili. Kelompok-kelompok masyarakat Timor Lorosa'e dan LSM di 13 kabupaten mengajukan usulan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelatihan, penguatan komunitas dan peningkatan penghasilan. Sejauh ini telah ada 276 kegiatan.
Gedung Parlemen Nasional	\$1,8	2000-2001	Konstruksi gedung bagi Parlemen Nasional Timor Lorosa'e
Perayaan Hari Kemerdekaan	\$1,8	Mei 2002	Konsultan, persiapan dan peralatan perayaan Kemerdekaan di Tasi Tolu
Pusat Pameran Nasional dan Komunitas	\$1,3	Dibuka pada 19 Mei 2002	Di bangun di kawasan pasar lama Kaikoli, Dili. Pusat ini akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan komunitas, fungsi-fungsi khusus, promosi kepariwisataan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Selama perayaan kemerdekaan di bulan Mei, Pusat ini dibuka oleh PM Australia John Howard, yang ditandai dengan pameran industri dan budaya Timor Lorosa'e. Sejak itu Pusat ini tidak lagi digunakan.

PBB mengenai prinsip-prinsip Kelautan. Hingga sekarang Australia menolak mendiskusikan batas perairan. Selanjutnya, Australia menarik diri dari Mahkamah Keadilan Internasional dan proses-proses hukum lainnya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan pada bulan Maret lalu, dengan meninggalkan jalan buntu bagi Timor Lorosa'e untuk mendapatkan hak-hak hukumnya.

Ladang minyak Laminaria/Corallina di dalam Laut Timor, suatu wilayah yang merupakan bagian dari Timor Lorosa'e sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional telah menghasilkan minyak sejak 1999 bagi Woodside Australian Energy dan mitra-mitranya. Lebih dari tiga tahun belakangan ini pemerintah Australia mendapatkan penghasilan sekitar 1 miliar dolar AS dari proyek ini atau sekitar sepuluh kali lipat dari apa yang diberikan oleh Australia kepada Timor Lorosa'e di bidang bantuan non-militer. Timor Lorosa'e tidak mendapatkan hasil apa pun dari Laminaria/Corallina.

Prioritas

Pada masa UNTAET, prioritas-prioritas yang ditetapkan AusAID adalah untuk meningkatkan kapasitas Timor Lorosa'e di bidang pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan, persediaan air, sanitasi dan pembangunan pedesaan. Proyek-proyek AusAID antara 1999 (termasuk periode referendum UNAMET) dan Juni 2002 mendukung sektor-sektor berikut:

Pada bulan Mei 2002 Australia bertekad memberikan lebih dari 12,5 juta dolar AS untuk tiga tahun mendatang bagi Program Dukungan Transisi, suatu mekanisme baru yang dikelola oleh Bank Dunia untuk membantu mendanai anggaran pemerintah Timor Lorosa'e.

Sebagian besar proyek-proyek AusAID ditenderkan, hampir seluruhnya untuk perusahaan-perusahaan besar, dan AusAID itu sendiri terlibat di dalam pengelolaan langsung dari program-program tersebut. Hal ini telah mengakibatkan sulitnya AusAID memberikan rincian-rincian proyek kepada publik, dan juga mengambil keputusan mengenai sub-kontrak di tangan perusahaan-perusahaan (dan sejumlah perusahaan internasional) Australia, dari pada pemerintah Australia.

Dukungan Australia bagi proyek-proyek besar yang dapat dilihat seperti gedung Parlemen, pusat Pameran, dan perayaan Hari Kemerdekaan dapat dipandang sebagai suatu cara untuk membumbui kehendak baik di antara orang-orang Timor Lorosa'e, dengan membuat mereka kurang bersemangat untuk mengadakan konfrontasi dengan Australia mengenai masalah Laut Timor dan masalah-masalah lainnya. AusAID setuju bahwa pihaknya ingin membangun suatu hubungan yang positif dengan Timor Lorosa'e, tetapi menyangkal motif-motif terselubung di balik prioritas-prioritas ini. Agen ini mengatakan bahwa bidang-bidang prioritasnya dikembangkan dalam konsultasi dengan UNTAET, para pemimpin Timor Lorosa'e dan donor-donor lain.

Prioritas-prioritas AusAID barangkali cepat berubah. Suatu tim dari Canberra mengunjungi Timor Lorosa'e pada bulan Oktober untuk mengkaji-ulang program AusAID. Suatu 'Strategi Negara Baru' sedang dipersiapkan untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pendanaan di masa depan.

Efektivitas proyek-proyek AusAID

Beberapa komentar pelaksana (kelompok-kelompok yang dikontrak oleh AusAID tidak ingin mengkritik AusAID secara publik):

√ Aleixo da Cruz dari Bia Hula merasa bahwa AusAID memperlihatkan sikap lebih percaya pada LSM setempat dibandingkan dengan donor-donor Eropa lainnya, yang lebih menginginkan LSM internasional. HTO, yang memulai proyek air bersih dan sanitasi di Viqueque, menerima cek dari AusAID untuk seluruh jumlah dana proyek di muka dari pada secara bertahap. Manajer HTO, António Amaral, melihat hal ini sebagai suatu tanda percaya. Ia juga memuji relatif cepatnya AusAID dalam memproses proyek-proyek, walaupun proposal terakhirnya kepada AusAID membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mendapatkan jawaban. Para pengelola LSM lokal ini dan Manajer Program Air Bersih dan Sanitasi Komunitas AusAID, Alan Smith, memuji fleksibilitas AusAID – kemauannya untuk menyesuaikan program agar cocok dengan kondisi-kondisi yang berubah atau yang tidak dapat diduga – dan tingkat konsultasi dan pemantauannya.

√ Catholic Relief Services (CRS, Pelayanan Bantuan Katholik), suatu LSM berbasis AS yang bekerja pada proyek pembangunan perdamaian AusAID di tahun 2001, juga disemangati oleh fleksibilitas AusAID. Sebagai contoh, ketika tim pembangunan perdamaian CRS merekomendasikan kepada AusAID, menyusul konsultasi pada tingkat masyarakat, agar buku-buku panduan mediasi konflik dikembangkan dengan masukan dari para pemimpin lokal pada permulaan program sebagaimana direncanakan, AusAID menyetujuinya. AusAID juga mendukung dilibatkannya LSM lokal oleh CRS di dalam upaya pembangunan perdamaian.

√ Kepala Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi (WSS) pada pemerintahan Timor Lorosa'e, João Jerónimo, merasakan bahwa pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan suatu proyek air bersih AusAID seringkali berulang-ulang, terutama sejak proyek tersebut secara fisik baru dimulai, tetapi ia menghargai tingkat konsultasi. Ia juga melihat bahwa semua penasehat yang disponsor AusAID yang bekerja pada WSS memiliki kemampuan berbahasa Tetun atau Bahasa Indonesia sangat sedikit.

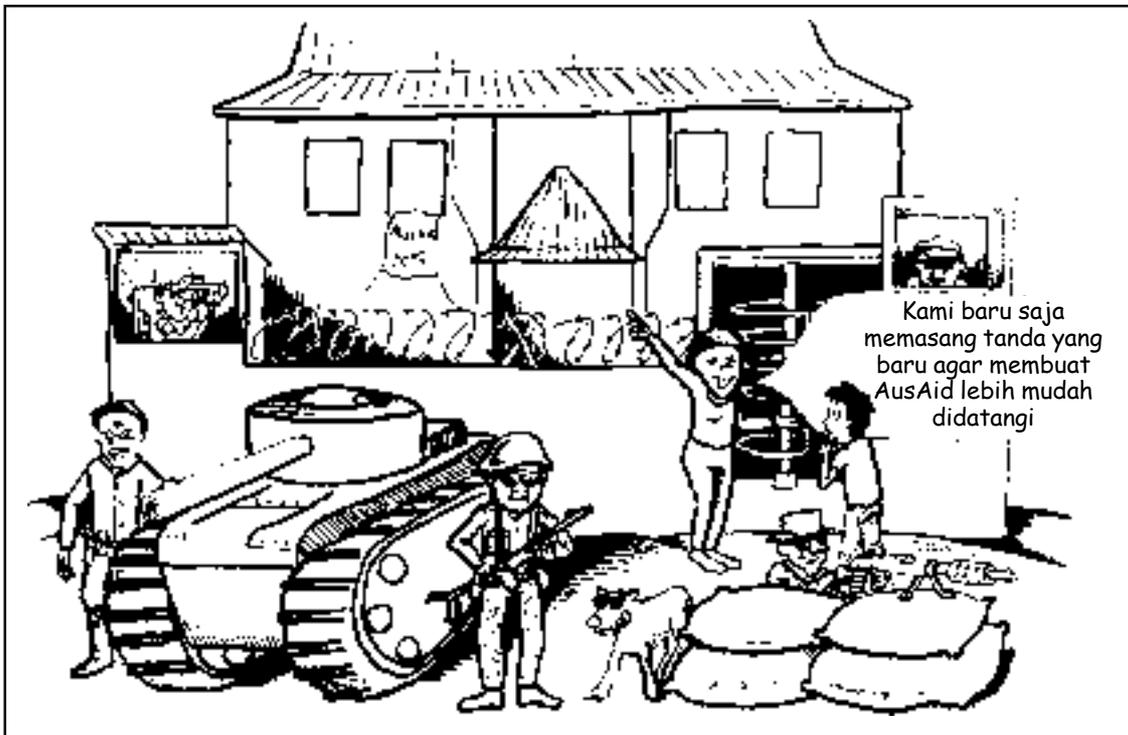
√ Panti asuhan yatim piatu ODB dibuka di Bebonuk, Dili Barat, pada bulan Desember 1999. Koordinatornya berpikir bahwa bantuan PKF Australia lebih membantu dari pada AusAID. AusAID mengirimkan proposal ETCAS dan mengecek panti asuhan tersebut di bulan Juni 2002, tetapi tidak memberikan jawaban dan sulit dihubungi lewat telpon genggam. Ketika ia berusaha mengunjungi Kedutaan Australia, ia malah disuruh pulang oleh tentara Australia.

Setelah mendatangi sejumlah proyek AusAID di lapangan, *La'õ Hamutuk* mempelajari:

√ Suatu pusat pelatihan komputer yang disponsori oleh AusAID (ETCAS) di Mota Ulun dekat Bazartete masih saja memiliki tiga komputer yang telah dioperasikan setelah 6 bulan. AusAID meninjau lokasi tersebut sebelum memberikan hibah dan kembali mengecek bagaimana uang tersebut telah digunakan.

√ Chefe de Suco Bazartete tidak terkesan dengan proyek air bersih CEP di wilayahnya tetapi terkesan dengan proyek lain dari air bersih yang dijalankan oleh AusAID.

√ Yayasan Ryder Cheshire di Tibar, suatu pusat bagi orang-orang cacat dan kurang gizi yang dijalankan oleh Australia



bagi orang Timor Lorosa'e, menerima sistem pompa air di bawah skema ETCAS AusAID pada bulan Desember 2001. Ketika pompa itu rusak belum lama berselang, AusAID memberikan komitmen lisan dalam waktu 24 jam untuk mananggung ongkos perbaikan yang mencapai 1.700 dolar AS. Pompa itu sekarang sedang menyuplai air bagi para pelanggan dan rumah-rumah staff dan menjadi titik pengambilan air bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.

- √ Program Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat telah dimulai pada Desember 2001 tetapi proyek-proyek fisik (dengan pengecualian proyek-proyek yang diterapkan CARE di tiga aldeia) baru dimulai di kabupaten Covalima dan Viqueque pada bulan Oktober 2002. Tetapi proyek tersebut telah menghasilkan data, laporan dan pertemuan yang sangat tebal. Hal ini meliputi data base dari sumber daya desa yang akan tersedia untuk proyek-proyek di masa depan, tidak hanya untuk proyek AusAID. Tingkat perencanaan dan koordinasi ini yang dapat dilihat oleh sementara kalangan secara lengkap – merupakan penghamburan sumber daya oleh yang lainnya, terutama karena program tersebut memiliki lima orang penasehat internasional yang bekerja penuh waktu.
- √ Sponsor AusAID bagi AVI (Sukarelawan Internasional Australia) dan APHEDA yang membantu NGO Forum telah menghasilkan sejumlah pelatihan yang berharga di bidang bahasa, manajemen, penulisan proposal, penyelesaian sengketa, petugas penghubung distrik dan bidang lainnya. NGO Forum, menurut salah seorang pekerjanya, dapat saja belajar secara langsung dari umpan-balik AusAID mengenai proposal-proposalnya tetapi umpan-balik tersebut sering tidak diberikan.
- √ Salah seorang pekerja pada Rumah Sakit Dili mengatakan bahwa AusAID telah memberikan pelatihan yang berharga di bidang spesialis seperti anestetik walaupun masih banyak pelatihan yang dibutuhkan oleh orang Timor Lorosa'e agar dapat melakukan segala kegiatan tersendiri tanpa bantuan orang lain.

- √ Salah seorang petugas bea cukai Timor Lorosa'e mengatakan bahwa bantuan AusAID kepada Pelayanan Perbatasan "sempurna," dan bahwa sesi pelatihan intensif dua pekan sangat efektif. Tetapi ia merasakan bahwa Pelayanan Perbatasan mendapatkan arahan dari banyak negara yang berbeda, masing-masing dengan prosedur dan struktur pabean tersendiri.
- √ Sementara itu AusAID memiliki daftar indikator kinerja kerja yang sangat tinggi untuk mengukur sukses sejumlah program (seperti bantuan Peningkatan Kesehatan Nasionalnya), sejumlah program AusAID kurang jelas indikator bagi pembangunan kapasitas. Suatu catatan peringatan pada 3 Mei 2002 secara cukup beralasan memperlihatkan perlunya 'meninjau kembali pembangunan kapasitas dan komponen-komponen penilaian ... dari Proyek Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat' (CWSSP), dan komentar serupa dilakukan dalam tinjauan ulang AusAID untuk program yang sama di bulan Juli 2002. Diwawancarai oleh *La'o Hamutuk* pada Oktober 2002, pimpinan program CWSSP Alan Smith menegaskan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan cara penilaian yang formal apakah program tersebut meningkatkan kapasitas orang Timor Lorosa'e untuk menangani masalah air bersih dan sanitasi. Kesalahan dalam rencana semula tengah ditangani oleh disediakannya penasehat AusAID (masih yang lain) guna membantu merancang indikator kinerja kerja dan strategi untuk mencapainya (di bulan Desember, setelah tujuh bulan AusAID mengidentifikasi masalah tersebut).

Rekomendasi

Berdasarkan pada penyelidikan kami, *La'o Hamutuk* mengusulkan perubahan-perubahan berikut dalam prosedur AusAID. Sebagian besar dari keprihatinan kami terkait erat dengan bantuan, ukuran pembangunan kapasitas, aksesibilitasnya untuk umum dan transparansi anggaran diterapkan oleh berbagai agen donor, tidak hanya AusAID.

1. Australia memiliki utang sejarah yang sangat besar terhadap rakyat Timor Lorosa'e, karena keterlibatannya dalam dan meraup keuntungan dari invasi dan pendudukan ilegal Indonesia. Sekarang Timor Lorosa'e sudah merdeka, Australia masih tetap "menduduki" ladang-ladang minyak dan gas yang seharusnya membantu Timor Lorosa'e membangun ekonominya. Canberra perlu memikirkan kembali relasinya dengan negara tetangganya yang lebih kecil di bagian utara – ke arah kemitraan dan bukan pemerasan. Australia harus meningkatkan bantuannya secara berarti bagi Timor Lorosa'e, untuk meyakinkan bahwa bantuan uang tersebut lebih menguntungkan orang Timor Lorosa'e dari pada perusahaan-perusahaan dan pekerja Australia, dan menghormati hukum internasional guna mengizinkan Timor Lorosa'e memperoleh bagiannya yang sesuai dengan hukum dari minyak dan gas Laut Timor.

2. AusAID seharusnya mengizinkan para kontraktor non-Australia untuk melaksanakan program-programnya. Kontrak-kontrak pelayanan AusAID di luar negeri membutuhkan para kontraktor "memiliki kantor pusat dan fasilitas terkait lainnya di Australia atau Selandia Baru" dan bahwa "kebanyakan dari tim yang diusulkan untuk tender adalah warga negara atau penduduk tetap Australia atau Selandia Baru yang kualifikasinya diakui di Australia atau Selandia Baru." Kebijakan ini dirancang untuk memberikan peluang-peluang kerja kepada usahawan dan LSM Australia dan juga untuk memastikan bahwa para kontraktor memiliki kemampuan teknis yang cocok dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Australia. Hal ini memastikan bahwa kebanyakan uang AusAID kembali mengalir ke Australia (karena orang-orang Australia menghabiskan sebagian besar dari penghasilan mereka di sana) dan bahwa perusahaan-perusahaan Australia memiliki peluang menjual barang dan jasa kepada proyek tersebut. Sebagian besar dari proyek Australia selanjutnya di-sub-kontrak lagi kepada LSM dan usahawan non-Australia (termasuk orang Timor Lorosa'e). Sejumlah proyek seperti ETCAS langsung dikelola oleh AusAID dan karena itu tidak membutuhkan kontraktor.

Sayangnya kebijakan di atas bisa mengarah pada tingkat administrasi yang berlebihan. Misalnya, AusAID menghendaki agar LSM AS Catholic Relief Services (CRS) untuk melaksanakan program pembangunan perdamaianya pada tahun 2001. Tetapi karena CRS bukan suatu LSM Australia, AusAID mengkontrak Caritas Australia yang kemudian mengkontrak lagi CRS mendukung program yang dijalankan oleh organisasi-organisasi di tingkat desa (dalam kasus Yayasan Edmund Rice di Railako, Ermera, organisasi lokal tersebut sebenarnya merupakan LSM Australia).

3. AusAID harus bisa dijangkau kembali dan seyogyanya memberikan informasi kepada orang Timor Lorosa'e. AusAID melaporkan secara teratur kepada Pemerintah Australia dan memiliki situs berbahasa Inggris yang informatif tetapi dapat berbuat lebih banyak untuk memberitahu kepada masyarakat Timor Lorosa'e tentang apa yang tengah dilaksanakan di negeri mereka. Sementara tingkat konsultasi AusAID pada tingkat desa dan selama proyek-proyek tersebut pada umumnya disambut, informasi yang banyak mengenai proyek-proyek AusAID

masih tetap saja sulit diperoleh orang Timor Lorosa'e. Pusat-pusat informasi seperti NGO forum, Xanana Reading Room dan LSM-LSM lokal jarang menerima pamflet atau booklet AusAID mengenai Timor Lorosa'e dalam bahasa tertentu, terutama bahasa-bahasa setempat. Untuk memperbaiki masalah ini secara sepihak, AusAID mengatakan pihaknya akan mendirikan suatu unit penterjemahan sehingga banyak dari informasinya dapat tersedia dalam bahasa-bahasa lokal.

Untuk mendatangi kantor AusAID secara langsung juga sulit. Banyak orang Timor Lorosa'e tidak tahu letak kantor AusAID, dan ketika mereka menemukannya (di lantai kedua dari Kedutaan Australia, tanpa tanda AusAID di depan kedutaan) mereka harus berhadapan dengan proses keamanan yang mengecilkan nyali yang melibatkan tentara PKF Australia, suatu detektor logam, pengecekan identitas, buku masuk, sticker 'pengunjung' dan suatu pintu 'sangkar burung' yang berputar. Di ruang penerimaan tamu, para tamu dapat saja, sebagaimana dilami *La'o Hamutuk*, ditemui oleh staff AusAID asal Timor Lorosa'e yang ramah – yang pengetahuan dan kewenangannya tampak terbatas pada proyek ETCAS AusAID. Ketika kami meminta informasi tertulis mengenai semua program utama AusAID dalam pertemuan pertama kami, tak seorang pun dari staff ini yang dapat memberikan informasi selain formulir proposal ETCAS kosong.

AusAID di Timor Lorosa'e memiliki alasan khusus untuk lebih dijangkau oleh publik. Di Indonesia, kantor AusAID juga berada di dalam kedutaan Australia. Tetapi tidak seperti Indonesia, proyek-proyek AusAID di Timor Lorosa'e melayani proporsi yang berarti bagi penduduk melalui penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas individu dan lembaga. Demikian juga, proyek-proyek AusAID seperti ETCAS disusun sehingga orang Timor Lorosa'e dapat bekerja secara langsung dengan AusAID, tanpa kontraktor penengah, sehingga hal ini membutuhkan akses yang lebih terbuka kepada orang-orang Timor Lorosa'e kepada personil AusAID. Akhirnya, Timor Lorosa'e merupakan sebuah negara baru dan sumber daya dan kebijakan yang terbatas dari pihak pemerintah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai suatu peluang untuk masukan masyarakat terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena alasan-alasan ini, AusAID di Timor Lorosa'e seharusnya memindahkan kantornya dari kedutaan Australia (sebagaimana terpisah dari Misi Australia di tahun 2001), atau sedikitnya memberikan tanda dan proses masuk yang lebih sederhana. Ia juga perlu menyediakan program-program terkini dalam bahasa Tetun.

4. AusAID perlu lebih transparan mengenai rincian anggaran. AusAID menolak mengeluarkan rincian-rincian kontrak proyek, termasuk informasi mengenai harga, karena melihat hal ini sebagai "rahasia bisnis" bagi AusAID dan kontraktor tersebut. *La'o Hamutuk* mendekati tiga kelompok yang dikontrak AusAID, dan mereka hanya dapat memberitahukan kepada kami keseluruhan ongkos kegiatan. Jika organisasi internasional menuntut agar orang Timor Lorosa'e terbuka kepada masukan-masukan dari masyarakat mengenai rincian proyek dan transparansi mengenai pengeluaran, donor seperti AusAID perlu memberikan contoh yang baik. ❖

Timor Lorosa'e Menempatkan Tentara AS di atas Hukum

Pada 1 Oktober, Timor Lorosa'e dan Amerika Serikat menandatangani Status of Forces Agreement – SOFA. Kesepakatan-kesepakatan SOFA, yang terdapat di ratusan negara, mengkhususkan pada undang-undang kejahatan, tanggungjawab pajak, hak-hak keimigrasian, penggunaan fasilitas-fasilitas umum dan hak-hak lain serta tanggungjawab para tentara dari satu negara yang ada di negara lain – dalam hal ini, militer AS yang berbasis di Timor Lorosa'e.

Tanggungjawab kejahatan adalah yang paling penting – untuk kejahatan-kejahatan biasa, seperti misalnya pencurian, pemerkosaan, penyergapan dan pembunuhan. Hal ini berbeda dari “kesepakatan impunitas” yang ditandatangani pada bulan Agustus yang mana hanya diaplikasikan untuk kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat *LH Bulletin* Vol.No.7, halaman belakang)

Sebagian besar dalam kesepakatan SOFA, para tentara harus tunduk pada undang-undang negara yang mereka kunjungi (lihat kolom bagian kanan). Jika mereka melanggar undang-undang itu, maka mereka akan dihukum baik oleh negara mereka sendiri maupun di negara di mana mereka berada; SOFA menentukan negara mana saja yang memiliki yurisdiksi utama. Dalam kesepakatan SOFA yang khusus, negara yang menjadi tuan rumah memiliki yurisdiksi untuk berbagai ragam pelanggaran, kecuali kalau korban berasal dari negara tentara yang bersangkutan. Pada beberapa SOFA, seperti misalnya antara AS dan Filipina, Filipina menyerahkan yurisdiksi primer kecuali dalam kasus-kasus khusus yang dianggap penting bagi mereka. Dalam setiap kejadian tertentu, kedua negara memiliki yurisdiksi paralel dan bisa mengadili kasus-kasus tersebut di mana negara dengan yurisdiksi primer gagal untuk melakukannya. Di Timor Lorosa'e, di mana Timor Lorosa'e tidak memiliki yurisdiksi atas tentara-tentara AS – maka hanya AS saja yang bisa memutuskan untuk mengadili.

SOFA antara AS dan Timor Lorosa'e memperlakukan personil militer AS seperti mereka bekerja di Kedutaan Besar AS. Hal ini mengacu pada Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan-hubungan Diplomatik untuk memberikan “kekebalan diplomatik” kepada mereka. Mereka tidak tunduk pada sistem perpajakan Timor Lorosa'e, aturan-aturan kontrak atau undang-undang kejahatan. Para otoritas Timor Lorosa'e tidak akan dapat menangkap mereka, menuduh mereka dengan kejahatan-kejahatan, mengekstradisi mereka ke negara lain, mengeledah rumah mereka atau kekayaan pribadi, memaksa mereka untuk memberi kesaksian di pengadilan, atau memberikan tanggungjawab bagi anak campuran di mana mereka bisa menjadi ayah. Mereka tidak dapat diadili terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban resmi mereka.

SOFA digunakan untuk personil militer AS di Timor Lorosa'e – para tentara dan pegawai-pegawai sipil asing AS dari Support Group East Timor (USGET) dan kontraktor seperti DynCorp-nya (lihat *LH Buletin* Vol. 3 No.2-3), kru-kru kapal perang, para pengawas militer PBB asal AS, para instruktur dan penasehat AS yang bekerja pada pemerintahan Timor Lorosa'e, setiap personel Pentagon yang ada di Timor Lorosa'e untuk aktivitas yang telah disetujui oleh kedua pemerintah serta keluarga-keluarga mereka. Personil militer Timor Lorosa'e di AS (jika ada), tidak mendapat privilege seperti yang didapat oleh militer AS.

Pada pembukaan SOFA menyatakan “mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Demokrat Timor Lorosa'e sebagai suatu hal yang paling penting”. Kedua negara “menyatakan kembali bahwa prinsip saling menghormati, persaudaraan, perbuatan yang baik, persekutuan dan kerja sama akan membimbing implementasi persetujuan ini. Namun pasal 9 persetujuan ini tidak mewujudkan persekutuan; pasal-pasal ini menunjukkan tidak ada saling menghargai. Apa yang mereka akui adalah kekuasaan negara besar atas negara yang paling kecil. Mereka menyatakan bahwa pemerolehan kedaulatan Timor Lorosa'e yang sangat sulit tidak bisa menandingi negara AS.

Kesepakatan berlaku segera setelah penandatanganannya, dan tidak memerlukan persetujuan Kabinet Timor Lorosa'e, Parlemen atau Presiden. Kesepakatan ini tidak bisa dirubah sampai April 2004, walau hanya enam bulan kemudian ditinjau kembali.

Sebagian besar SOFA Menghormati Hukum dari Negara yang menjadi tuan rumah

SOFA antara Amerika Serikat dan Filipina, 1998 (mirip dengan SOFA yang lain)

“Merupakan kewajiban personil Amerika Serikat untuk menghormati hukum Republik Filipina dan menjauhkan diri dari berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan semangat kesepakatan ini, dan secara khusus, dari kegiatan politik tertentu di Filipina.”

Kesepakatan Status Misi (SOMA) antara PBB dan Timor Lorosa'e (bagi UNMISSET), 20 Mei 2003 (mirip dengan kesepakatan UNTAET)

“UNMISSET dan anggota-anggotanya harus menghormati semua hukum dan peraturan setempat. Utusan Khusus akan menempuh berbagai cara yang dipandang wajar untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini.”

SOFA antara Amerika Serikat dan Timor Lorosa'e pada 1 Oktober 2002 tidak mengandung satu kata pun yang mengakui bahwa Timor Lorosa'e memiliki hukum-hukum dan peraturan setempat, atau membulatkan tekad personil-personil AS untuk menghormati semangat kesepakatan tersebut atau menjauhkan diri dari kegiatan politik.

Komentar LH: *Menggunakan kekebalan diplomatik pada personil Militer AS di Timor Lorosa'e merupakan suatu distorsi/penyelewengan terhadap Konvensi Wina yang didasari atas hak-hak yang sama untuk kedua negara dan berlaku saja untuk para diplomat dan bukan untuk para tentara. Jika Timor Lorosa'e benar-benar merdeka, maka para lidernya harus berpihak dan menyerahkan hidup mereka kepada hak-hak rakyatnya. Kejahatan-kejahatan yang melanggar hak-hak Rakyat Timor Lorosa'e, apapun kewawarganegaraannya atau seragamnya, harus dipertanggungjawabkan.* ❖

Bantuan Militer Australia kepada Timor Lorosa'e

Pasukan InterFET yang dipimpin Australia telah memberikan sumbangsih yang berarti menuju pemulihan perdamaian dan keamanan di Timor Lorosa'e setelah wilayah ini diporakporandakan di bulan September 1999 oleh milisi pro-Jakarta yang didukung oleh tentara Indonesia dan polisinya, walaupun banyak kerusakan masih dapat dihindarkan jika saja Australia dan negara-negara lainnya bertindak lebih cepat.

Dewasa ini personil militer Australia tengah mengabdikan pada misi-misi PBB di Timur Tengah (Israel, Palestina dan Mesir), Mozambique, Ethiopia, Eritrea dan Timor Lorosa'e serta di dalam misi-misi multinasional yang lainnya di bekas Yugoslavia, Bougainville (Papua New Guinea), Kepulauan Solomon dan Sierra Leone. Australia juga memberikan bantuan militer kepada Papua New Guinea, Malaysia, Filipina, Timor Lorosa'e dan negara-negara lainnya.

Selama pendudukan ilegal Indonesia atas Timor Lorosa'e, Australia memberikan bantuan militer kepada militer Indonesia (TNI); hingga tahun 1999 jumlah yang diketahui secara umum ialah 40 juta dolar AS per tahun, sebagai tambahan untuk kerja-sama yang termasuk di dalam anggaran-anggaran lainnya. Menyusul krisis Timor Lorosa'e di tahun 1999, Australia menghentikan bantuan militer, walaupun sejumlah pejabat TNI sekarang tengah berguru pada Sekolah Tinggi Pertahanan Australia di Canberra, dan terdapat beberapa pejabat militer Australia di pusat pelatihan TNI di Bandung. Sejak pemboman di Bali pada 12 Oktober 2002, polisi Australia dan Indonesia telah bekerja sama secara lebih dekat.

Selama kekerasan yang dilakukan oleh tentara/milisi menjelang referendum 1999, pihak intelijen Australia mengetahui banyak hal mengenai rencana dan operasi militer Indonesia dan milisinya. Mereka menolak membagikan banyak informasi dengan PBB atau pejabat Timor Lorosa'e, yang barangkali dapat digunakan untuk mencegah sejumlah perusakan. Bahkan hingga sekarang, Australia masih menyembunyikan informasi tersebut dari para penyelidik dan jaksa yang tengah berupaya mengadili para pelaku kejahatan serius di tahun 1999.

Kontingen Australia pada UNTAET / UNMISSET

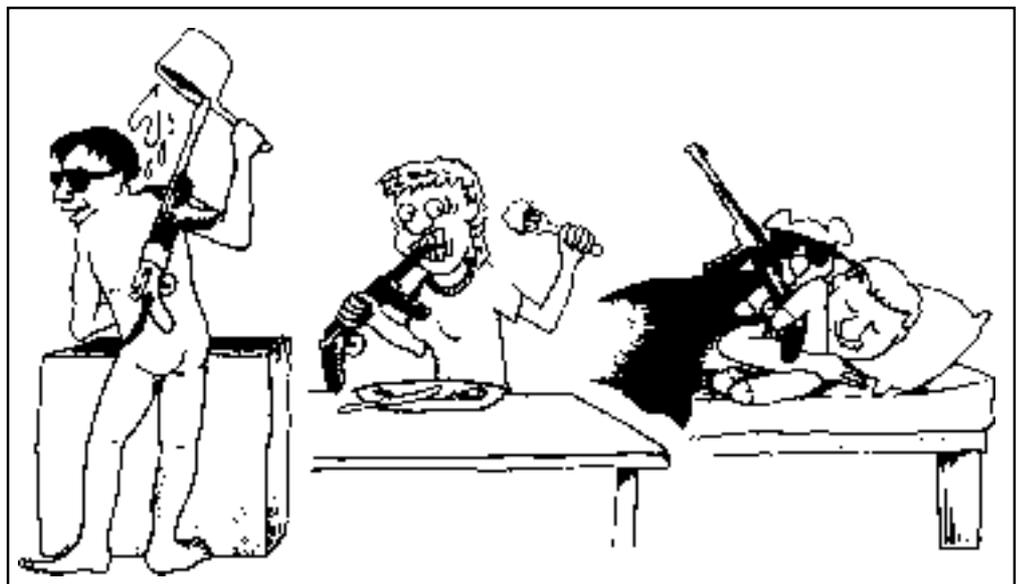
Pada bulan Desember 2002, sedikitnya 1030 PKF PBB Australia mengabdikan di Timor Lorosa'e. Mereka merupakan bagian dari UNMISSET dan berada di bawah komandan PKF UNMISSET Mayor Jenderal Tan Huck Gim asal Singapura. Sebagian besar PKF PBB asal Australia bekerja sebagai bagian dari AUSBATT (Batalyon Australia) di Kabupaten Bobonaro, di perbatasan dengan Indonesia.

Kontingen PKF PBB Australia pada umumnya diterima baik di kalangan masyarakat Timor Lorosa'e karena keramahan, terutama dengan anak-anak, dan profesional-

ismenya. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa tentara Australia tetap menenteng senjata bahkan pada saat mereka tidak sedang menjalankan tugas. Sejumlah pejabat PKF Australia menjelaskan bahwa UNMISSET merupakan suatu Misi Penegakan Perdamaian Bab 7 (yakni siaga tinggi), sehingga semua anggota PKF berhak membawa senjata. Bagian besar kontingen nasional yang lain memilih tidak menjalankan hak ini pada saat tidak bertugas, tetapi Pemerintah Australia telah memerintahkan tentaranya membawa senjata bahkan pada saat tidak sedang bertugas. Menurut Wakil Komandan PKF, Kesepakatan Status Misi (SOMA) UNMISSET yang ditanda-tangani pada 20 Mei 2002 mengharuskan semua tentara yang menenteng senjata harus memakai seragam, dengan sedikit perkecualian.

Sedikitnya salah seorang pejabat senior PKF PBB merasa bahwa kontingen Australia sombong; karena mereka memimpin intervensi militer 1999 di Timor Lorosa'e di bawah InterFET dan "mereka tidak pernah menanggalkan sikap serupa." Di bulan September 2002, Australia menempatkan container, karung-karung berisi pasir, kendaraan berlapis-baja, dan pasukan PKF bersenjata di depan kedutaan mereka di Dili; mereka juga menutup kedutaan tersebut pada 16 September dan mengevakuasi staff mereka. Presiden Xanana Gusmão mengatakan bahwa ia "sangat malu dengan sikap kedutaan Australia atas keprihatinan mereka akan ancaman teroris, kendatipun keamanan Timor Lorosa'e berada di bawah PKF PBB. Dan saya juga heran dengan tindakan yang ditempuh Pemerintah Australia." Kendatipun demikian, pemerintah Australia meyakinkan *La'o Hamutuk* bahwa konsultasi yang wajar ditempuh.

Sebagai tambahan terhadap peranan mereka di bidang keamanan, sejumlah tentara Australia di Timor Lorosa'e telah membangun kembali bangunan-bangunan dan melaksanakan sejumlah karya kemanusiaan. Pekerjaan ini membantu Misi PBB dan rakyat Timor Lorosa'e, walaupun penggunaan tentara untuk kegiatan-kegiatan non militer melanjutkan pola dwi-fungsi yang telah dipatenkan selama pendudukan Indonesia, dan menciptakan kebimbangan



seputar peranan militer di dalam suatu masyarakat demokratis. Di Australia, pekerjaan ini digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap militer, dan mendorong kaum muda dengan cita-cita kemanusiaan untuk bergabung dengan Pasukan Pertahanan Australia.

Program Kerja-sama Pasukan Pertahanan Australia

Misi UNMISSET, termasuk PKF Australia dan personil sipil, dijadwalkan meninggalkan Timor Lorosa'e di bulan Juni 2004. Pada titik tersebut Falintil-FDTL, Pasukan Pertahanan Timor Lorosa'e akan mengemban tanggung-jawab atas pertahanan nasional. Namun demikian Australia akan tetap menjalin kerja-sama dengan FDTL dalam rangka memperkuat pertahanan Timor Lorosa'e.

Salah satu program yang masih akan berlanjut setelah Juni 2004 ialah Program Kerja-sama Pasukan Pertahanan. Program ini dijalankan oleh Pasukan Pertahanan Australia, yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PBB. Program ini terdiri dari Tim Dukungan Pelatihan Australia, para penasehat Australia pada Kantor Pengembangan Pasukan Pertahanan Timor Lorosa'e (ODFD), Pelatihan Tingkat Pemula kepada para pejabat FDTL, dan bantuan yang lainnya. Menurut koordinator Program Australia, Letnan Kolonel Marcus Rodda, pihak militer Australia bertujuan membangun hubungan yang kuat dengan militer Timor Lorosa'e dan membantu mereka dalam rangka mengembangkan institusi angkatan bersenjata.

Program ini pada mulanya didiskusikan dalam suatu Konferensi Donor bagi Falintil – FDTL pada pertengahan tahun 2000. Dua penasehat Australia mulai bekerja pada ODFD pada bulan November 2000, dan di bulan Februari 2001, 21 pelatih Australia membentuk Tim Dukungan Pelatihan di pusat pelatihan FDTL di Metinaro. Salah satu majalah tentara Australia mengutip salah seorang pelatih Australia menyebutkan bahwa bahasa merupakan suatu masalah. Tetapi, para pelatih Australia memberikan serangkaian kursus di bidang taktik dan teknik perang modern, medis, dan komunikasi bagi batalyon FDTL baik yang berada di Metinaro maupun Los Palos.

Personil Australia dalam Program Kerja-sama Pasukan Pertahanan (pada bulan November 2002)	
Bidang kerja	Jumlah personil Australia
Kantor Pengembangan Pasukan Pertahanan (ODFD)	4
Tim Dukungan Pelatihan Australia:	
Penasehat Batalyon	8
Proyek Bahasa Inggris	4
Proyek Komunikasi	4
Umum (Logistik, Medis dan Senjata)	3
Pelatihan Kepemimpinan tingkat Pemula	4
JUMLAH	27

Para penasehat Australia pada ODFD melaksanakan manajemen keuangan, penilaian kebutuhan, perencanaan

strategis dan komunikasi. Mereka tidak mengumpulkan data intelijen. Selain terdapat para penasehat Australia, ada juga penasehat dari AS, Inggris, Selandia Baru, Malaysia, Portugal dan Thailand yang bekerja pada ODFD di bawah Sekretaris Negara Urusan Pertahanan Timor Lorosa'e Roque Rodrigues. *La'o Hamutuk* akan memantau departemen ini secara lebih lengkap dalam suatu *Buletin* mendatang.

Anggaran Australia untuk Program Kerja-sama Pasukan Pertahanan bernilai sekitar 4,9 juta dolar AS per tahun. Kurang dari setengah dari anggaran ini disalurkan ke ongkos personil, dengan yang lainnya dialokasikan ke peralatan seperti jaringan infanteri, botol aqua, kasur, komputer dan peralatan radio. Selain itu, Australia juga telah menyediakan dana 3,6 juta dolar AS di tahun 2001 untuk membangun Pusat Pelatihan FDTL di Metinaro. Selama periode UNTAET, Australia meminjamkan senjata-senjata otomatis dengan amunisinya kepada FDTL untuk digunakan selama latihan. Setelah kemerdekaan, Australia membantu FDTL membeli sekitar 1.000 pucuk senjata ringan.

Tim Dukungan Pelatihan Australia meliputi para penasehat Batalyon yang memberikan pelatihan di bidang komando, perencanaan, disiplin dan prosedur militer dan bidang-bidang lainnya sejauh diminta. Tim tersebut memiliki para spesialis yang menangani kebutuhan logistik dan medis Australia, tetapi juga memberikan pelatihan kepada tentara Timor Lorosa'e di bidang-bidang ini. Ahli komunikasi juga membantu mendirikan sistem komunikasi frekwensi tinggi dan membangun jaringan komputer lokal untuk membantu staff markas besar FDTL melakukan pertukaran informasi di antara komputer-komputer mereka.

Bantuan yang lain meliputi pelatihan bahasa Inggris bagi para personil FDTL, termasuk mempersiapkan tiga orang untuk mengikuti pelatihan militer di Canberra pada tahun 2003. Program bahasa Inggris telah dijalankan oleh Australia sejak tahun 2000, juga AS berencana untuk memberikan peralatan laboratorium bahasa Inggris di bulan Februari 2003.

Program Pelatihan Kepemimpinan Pemula akan melibatkan pelatihan kepemimpinan kepada 30 anggota FDTL di Queensland, Australia. FDTL pada gilirannya akan melakukan kursus serupa di Timor Lorosa'e, bersama dengan enam orang pejabat militer Australia. Diharapkan agar kursus kepemimpinan di masa depan dapat dijalankan tanpa keterlibatan Australia.

Selama Konferensi Donors bagi FDTL di bulan Agustus 2002, para peserta mendiskusikan kemungkinan bagi FDTL menggunakan barak PKF Australia di Maliana setelah PKF menarik diri. Akan tetapi, salah seorang pejabat militer Australia mengatakan bahwa baik FDTL maupun pemerintah Timor Lorosa'e telah meminta kepada Australia mengenai masa depan basis ini. Konferensi tersebut juga mendiskusikan barak baru FDTL di Baucau karena barak yang sekarang dipakai di Los Palos dipandang berada di bawah standar dan lokasinya bukan di daerah central. Kendatipun demikian, baik Australia maupun donor menawarkan uang bagi barak Baucau, dan hal ini belum diputuskan apakah proyek tersebut masih berlanjut. ❖

Kronologi Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Di Laut Timor

Periode Portugis tahun 1500an sampai 1975

1893: Eksplorasi non-pribumi sumber minyak lepas pantai yang pertama di Timor Portugis dilakukan di Laclubar, Manatuto, dengan mengeksplor dalam skala kecil.

1956: Perusahaan Timor Oil yang berbasis di Australia memulai eksplorasi minyak lepas pantai dan 12 tahun kemudian bergabung dengan perusahaan lain.

1956: Portugal mengklaim kedaulatan atas dasar laut sesuai dengan prinsip-prinsip garis tengah yang kemudian diratifikasi pada Konvensi Wina tahun 1958. Australia menolak klaim itu, dengan pernyataan persaingan mengenai wilayahnya.

1970-1972: Beberapa perusahaan perminyakan Australia melakukan eksplorasi dekat dengan dan di lepas pantai bagian selatan Timor Portugis.

1970: Australia dan Indonesia mulai mengadakan negosiasi atas batas-batas dasar laut, tanpa mengindahkan penolakan Portugis bahwa dasar laut hendaknya dibagikan di tengah antara Timor dan Australia. Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan "menetapkan batas-batas tertentu di dasar laut" pada 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972, selanjutnya diberlakukan pada bulan Nopember 1973. Kesepakatan-kesepakatan tersebut didasari pada prinsip landas kontinental, yang hasilnya menguntungkan Australia. Karena Portugal tidak mengambil bagian dalam kesepakatan itu, maka kedua negara tidak menentukan garis batas antar Timor Portugis dan Australia, akhirnya memunculkan istilah "Celah Timor".

1974: Portugal memberi izin eksplorasi eksklusif kepada sebuah perusahaan perminyakan Amerika Serikat, Oceanic Exploration/Petro Timor di Laut Timor. Area eksplorasi yang diizinkan meliputi 60.700 kilometer persegi yang luasnya mulai dari dekat pesisir pantai selatan Timor Portugis sampai dengan garis tengah dengan Australia. Australia menolak perizinan itu.

1974: Ladang Sunrise Gas ditemukan, walaupun isu-isu politik dan lainnya mengakibatkan penundaan pertambangan sampai dengan beberapa tahun terakhir.

17 Ag 1975: Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Woolcott mengirim telegram kepada pemerintahnya "... menutup celah yang sekarang dengan batas yang disetujui ... lebih mudah dinegosiasikan dengan Indonesia ... dari pada dengan Portugal atau Timor Portugis yang merdeka.

Pendudukan Indonesia tahun 1975 sampai 1999

7 Des 1975: Indonesia mencaplok Timor Lorosa'e. Petro Timor dan semua lembaga Portugis melarikan diri.

17 Juli 1976: Indonesia mengklaim untuk mengabungkan Timor Lorosa'e sebagai propinsinya yang ke-27, tetapi PBB tetap memandang wilayah itu sebagai jajahan Portugis sampai 1999.

Okt 1976: Menteri Kehakiman Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Indonesia telah siap mengadakan negosiasi mengenai batas dasar laut untuk menutup celah Timor dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana termuat dalam kesepakatan-kesepakatan antara Australia-Indonesia pada tahun 1971-2 (batas-batas landas kontinental yang menguntungkan Australia)

20 Jan 1978: Australia "mengakui secara *de facto*" bahwa Timor Lorosa'e adalah bagian dari Indonesia.

Feb 1979: Australia dan Indonesia mulai menegosiasi batas laut bagian Selatan dari Timor Lorosa'e, yang menandakan pengakuan Australia "de jure atau secara hukum" atas aneksasi Indonesia terhadap Timor Lorosa'e. Lebih dari belasan negosiasi dilakukan pada dekade berikutnya.

Okt 1983: Sumur minyak *Jabiru 1a* di laut Timor antara Timor Barat dan Australia), dibor oleh perusahaan BHP Australia dengan menemukan kandungan minyak yang cukup besar. Eksplorasi dan uji-coba sumur-sumur minyak tetap berlangsung dengan penyulingannya dimulai pada 1986. Pada tahun 1989 dikonfirmasi bahwa cadangan kandungan minyak di Laut Timor ada 241 juta barel dan sumur minyak Jabiru La memproduksi 42.000 barel setiap hari.

11 Des 1989: Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Kesepakatan Celah Timor dalam satu acara di atas pesawat terbang yang sedang melintasi Laut Timor. Kesepakatan itu menentukan Zona Kerjasama (ZOC) di bagian utara garis tengah antara Timor Lorosa'e dan Australia. Kesepakatan inilah menuntun eksplorasi bersama antara Indonesia dan Australia dengan hasil bagi pendapatan 50%-50% di daerah yang diduduki secara illegal. Portugal langsung memprotes kesepakatan in.

Okt 1990: Juru bicara perlawanan Jose Ramos-Horta melayankan sebuah surat dengan mengatakan: "*Perusahaan-perusahaan perminyakan Australia disarankan dengan tegas agar tidak melompat masuk ke daerah Celah Timor. ... Suatu nasehat yang baik bagi bisnismen Australia: tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya dalam 5 sampai 10 tahun mendatang*"

Feb 1991: Pemimpin Perlawanan Timor Lorosa'e Xanana Gusmao menulis surat kepada Parlemen Australia dengan mengatakan: "*Australia telah menjadi kaki-tangan pembantaian yang dilakukan oleh tentara-tentara pendudukan, karena kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh Australia hanyalah untuk mempertahankan penggabungan Timor Lorosa'e ke Indonesia adalah sangat jelas. Bukti yang paling baik adalah kesepakatan Celah Timor.*"

9 Feb 1991: Kesepakatan Celah Timor diberlakukan setelah diratifikasi.

- Feb 1991: Pemerintah Portugis mulai mengadu perkara melawan Australia dengan mengadu perkara ini di Pengadilan Internasional di Netherland, Belanda. Portugal berpendapat bahwa Kesepakatan Celah Timor melanggar hak penentuan nasib sendiri Timor Lorosa'e dan melanggar hak Portugal sebagai penguasa administratif. Karena Indonesia tidak menerima yurisdiksi pengadilan tersebut, maka hanya Australia yang digugat.
- 12 Nop 1991: Tentara Indonesia membantai masyarakat Timor Lorosa'e yang jumlahnya lebih dari 250 orang dalam demonstrasi damai di makam Santa Cruz Dili.
- 11 Des 1991: Australia dan Indonesia melakukan kontrak pembagian hasil kepada Phillips Petroleum, Royal Dutch Shell, Woodside Energy dan perusahaan minyak lainnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kandungan minyak di Zona Kerjasama Celah Timor. Petro Timor menolak tawaran dengan menyatakan bahwa kesepakatan itu melanggar klaim sahnya. Kontrak tetap diberikan dan eksplorasi tetap berlangsung selama tahun 1990-an.
- 1994: Minyak yang pertama kali dapat dieksplorasi di Zona Kerja sama ditemukan di Elang Kakatua.
- Juni 1994: Pengadilan International mengadili pengaduan Portugal melawan Australia dengan suara 14-2 dimana pengadilan memperkuat hak penentuan nasib sendiri namun Kesepakatan Celah Timor tidak dapat dibatalkan karena Indonesia yang dituntut atas pengklaiman Timor Lorosa'e tidak menerima yurisdiksi pengadilan itu. Ada dua hakim yang tidak setuju sedang yang satunya memberikan catatan bahwa "tindakan Australia untuk masuk dalam Kesepakatan Celah Timor akan bertentangan dengan hak-hak rakyat Timor Lorosa'e."
- Okt 1994: Woodside menemukan sumber minyak di Laminaria, sepanjang daerah kerja sama yang mana daerah itu bisa menjadi milik Timor Lorosa'e jika batas laut 1971-2 antara Australia dan Indonesia ditentukan secara jujur dengan melibatkan Portugal / orang Timor Lorosa'e.
- 1995: Phillips Petroleum dan perusahaan-perusahaan lainnya menemukan ladang minyak dan gas Bayu-Udang di daerah kerja sama.
- 14 Mar 1997: Australia dan Indonesia menandatangani kesepakatan tentang batas perairan laut, namun bukan batas kekayaan-kekayaan dasar-laut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi hukum laut PBB 1982.
- 22 Juli 1998: Pemimpin CNRT Mari Alkatiri, José Ramos Horta dan João Carrascalão mengeluarkan suatu pernyataan: "CNRT mendukung hak-hak para kontraktor Celah Timor yang sedang beroperasi dan juga pemerintah Australia untuk bersama-sama mengeksplorasi cadangan-cadangan minyak lepas pantai Timor Lorosa'e, bekerjasama dengan orang Timor Lorosa'e."
- Juli 1998: Memulai produksi di ladang minyak yang kecil Elang Kakatua yang terbentang di daerah kerja sama . Pada tahun 2002, ladang itu sering mengalami kekeringan karena telah memproduksi sekitar 31 juta barel minyak untuk Phillips Petroleum dan mitra-mitranya. Walaupun Australia dan Indonesia telah mendapat keuntungan dari ladang ini, namun jata pendapatan untuk Timor Lorosa'e yang jumlahnya sekitar US\$2 juta/tahun sejak tahun 2000 telah disimpan pada rekening pihak ketiga sambil menunggu ratifikasi kesepakatan laut Timor tanggal Mei 2002.

Tahun 1999

- 27 Jan: Presiden Indonesia BJ Habibie menerima tuntutan masyarakat Timor Lorosa'e untuk melakukan referendum bagi kemerdekaan yang diawasi secara internasional . Kemudian selama delapan bulan terjadi teror dan penghancuran yang dilakukan oleh TNI /Milisi.
- 30 Ag: Mayoritas Masyarakat Timor Lorosa'e memilih untuk menolak integrasi dengan Indonesia. Setelah pengrusakan total oleh Tentara Indonesia selama menarik mereka, Timor Lorosa'e langsung berada dibawah bimbingan pemerintahan transisi PBB sampai kemerdekaan pada bulan Mei tahun 2002.
- Okt: Tuju perusahaan perminyakan yang dipimpin oleh Phillips Petroleum mengesahkan pembangunan ladang minyak dan gas Bayu-Udang di daerah kerja sama. Semenjak itu, perusahaan-perusahaan ini telah menginvetasi modalnya sekitar US\$ 1.5 juta untuk menjalankan proyek ini. Tahap pertama, perusahaan ini akan memproduksi cairan yang mana akan dimulai pada tahun 2004. Tahap kedua, perusahaan ini akan memproduksi gas yang sedianya akan dimulai pada tahun 2006. Total pendapatan untuk pemerintah Timor Lorosa'e dari Bayu-Udang bisa mencapai lebih dari US\$3 miliar, 20 kali lipat dari pendapatan Elang-Kakatua.
- Nov: Proyek Woodside di Laminaria-Corallina (termasuk BHP dan Shell) mulai memproduksi minyak. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi minyak sebanyak 100 juta barel lebih, sekitar separuh dari total cadangan minyak selama dua tahun mendatang dengan memberikan keuntungan bagi pemerintah Australia lebih dari US\$900 juta. Beberapa bahkan semua pendapatan ini seharusnya menjadi milik Timor Lorosa'e jika Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) ditentukan dengan prinsip-prinsip hukum laut PBB (Konvensi hukum laut PBB).
- 29 Nop: Mari Alkatiri, juru bicara Timor Lorosa'e untuk masalah Celah Timor mengatakan "kami masih menganggap Kesepakatan Celah Timor adalah suatu kesepakatan yang ilegal. Ini adalah makna dari prinsip itu. Kami tidak mau menjadi penerus suatu kesepakatan ilegal."

Tahun 2000

10 Feb: Australia dan UNTAET menandatangani dokumen Pertukaran Nota sementara dan Memorandum Saling Pengertian untuk tetap melanjutkan Kesepakatan Celah Timor 1989 antara Australia dan Indonesia namun posisi Indonesia ditempati oleh Timor Lorosa'e. Kesepakatan ini menyatakan pembagian pendapatan minyak dan gas dari daerah kerja sama 50-50 antara Australia dan Timor Lorosa'e yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Celah Timor, kemudian sekarang disebut Daerah Pertambangan Minyak Bersama/Joint Petroleum Development Area (JPDA). Kesepakatan ini tidak menyinggung tentang ladang-ladang minyak dan gas di luar JPDA, yang seharusnya ada dalam zona ekonomi eksklusif Timor Lorosa'e.

Okt: UNTAET memulai adakan negosiasi dengan Australia tentang sebuah kesepakatan untuk jangka panjang menyangkut pembagian kekayaan-kekayaan Laut Timor tetapi negosiasi itu bukan mengenai batas-batas maritim atau ZEE.

Tahun 2001

Feb: Ramiro Paz, Penasehat Senior bidang Ekonomi UNTAET pada pemerintahan transisi Timor Lorosa'e (ETTA) menulis surat setebal enam halaman dengan judul "Perjanjian Celah Timor vs Zona Ekonomi Eksklusif: Kemerdekaan Ekonomi bagi Timor Lorosa'e" kepada Menteri Ekonomi ETTA, Mari Alkatiri. Paz dengan tegas merekomendasikan bahwa Timor Lorosa'e harus menuntut hak penuh atas Zona Ekonomi Eksklusif dibawah hukum internasional dari pada menerima saja atau meninjau kembali isi Kesepakatan Celah Timor yang sudah tidak berlaku.

9 April: Menteri Urusan bidang Politik UNTAET, Peter Galbraith berbicara dihadapan Asosiasi eksplorasi dan produksi minyak Australia. Seusai negosiasi putaran kedua dengan Australia, Galbraith meminta membatalkan Kesepakatan Celah Timor kemudian menegosiasi batas-batas laut dengan Australia berdasarkan Hukum Internasional. Ia memberikan argumentasi bahwa sebuah kesepakatan harus dicapai sebelum 15 Juli untuk menghindari kemungkinan adanya komplikasi dari Timor Lorosa'e segera setelah pemerintahannya terpilih.

5 July: Galbraith, Alkatiri, dan dua menteri Australia menandatangani Memorandum Saling Pengertian yang disebut Rancangan Perjanjian Laut Timor. Rancangan Perjanjian inilah yang menggantikan Memorandum Saling Pengertian Pebruari 2000. Dengan Rancangan itu pula, Timor Lorosa'e akan menerima 90% dan Australia 10% pendapatan minyak dan gas dari Daerah Pertambangan Minyak Bersama/JPDA. JPDA berasal Daerah Kerja Sama/ZOC yang termuat dalam Kesepakatan Celah Timor 1989, dengan perubahannya hanya ada pada pembagian pendapatan. Ladang gas terbesar Greater Sunrise dinyatakan 20% kandungan gas terletak di Daerah Pertambangan Minyak Bersama/JPDA dan 80% kandungan gas terletak di wilayah

Australia. Walaupun Rancangan itu "tidak memprejudis" masa depan penyelesaian batas dasar laut, namun rancangan ini tidak mempersoalkan klaim Australia atas ladang-ladang minyak di luar JPDA.

Agt: PetroTimor memasukan berkas gugatan ke Pengadilan Federal Australia atas dasar kesepakatannya dengan Portugal pada tahun 1974. Perusahaan ini menginginkan miliaran dolar sebagai kompensasi terhadap kerugian pendapatannya dari minyak dan gas Laut Timor.

30 Agt: Timor Lorosa'e mengadakan pemilihan Majelis Konstituant untuk menulis Konstitusi, yang kemudian dialihkan menjadi Parlemen pertama, Fretilin memenangkan 57% suara.

21 Des: Phillips Petroleum dan UNTAET menyetujui paket pajak dan fiskal untuk menentukan bagaimana pemerintah baru Timor Lorosa'e akan memperoleh keuntungan dari pendapatan dan investasi di ladang minyak dan gas Bayu Udang yang ada daerah Pertambangan Minyak Bersama/JPDA. "Kesepakatan Bayu" memakan waktu berbulan-bulan adakan negosiasi, di mana perusahaan Phillips berusaha menggunakan pemerintah Australia dan Amerika untuk menekan pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e. Perdebatan isu-isu tersebut dilanjutkan pada Agustus dan Oktober 2002.

Tahun 2002

15 Mar: Phillips mengumumkan bahwa dua perusahaan Tokyo untuk membeli gas Bayu Udang selama 17 tahun, mulai tahun 2005.

21 Mar: Australia secara formal menarik diri dari proses hukum internasional untuk menyelesaikan persengketaan batas laut di bawah Hukum Kelautan dan Pengadilan Internasional.

23 Mar: PetroTimor mengadakan seminar mengenai Celah Timor di Dili. Pakar-pakar mereka memberikan argumentasi bahwa Timor Lorosa'e secara sah memiliki 100% atas ladang Sunrise dan Bayu-Udan, demikian pula ladang-ladang di Laminaria/Coralina.(yang terletak di luar JPDA). Ahli hukum batas laut Australia Christopher Ward mengatakan "Kesepakatan 5 Juli antara Australia dan UNTAET menunjukkan strategi politik agar Timor Lorosa'e tidak akan mempersoalkan lagi kesepakatan-kesepakatan masa lalu".

April: Peter Galbraith menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan oleh UNTAET mengenai Laut Timor kepada Majelis Konstituant Timor Lorosa'e. Ia menegaskan bahwa Timor Lorosa'e memiliki "klaim legal yang sangat bagus" dari Rancangan yang disepakati pada Juli 2001, dan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir apabila persoalan batas laut diselesaikan pada akhirnya Timor Lorosa'e akan memperoleh 100% batas dasar laut yang disepakati. Galbraith mengklaim bahwa kesepakatan yang tertera di Memorandum Saling Pengertian bulan Juli 2000 merupakan "upaya yang paling baik bagi Timor Lorosa'e yang dapat dinegosiasikan dengan Australia".

- 17 Mei: Pengembangan pengeboran dari 16 sumur dimulai di Bayu-Udan.
- 19 Mei: Kelompok-kelompok masyarakat sipil Timor Lorosa'e dan partai-partai politik oposisi memprotes penandatanganan Perjanjian Laut Timor antara Perdana Menteri Timor Lorosa'e dan Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia John Howard.
- 19-20 Mei (dini hari): Republik Demokratik Timor Lorosa'e menjadi sebuah negara merdeka.
- 20 Mei: Perdana Menteri Timor Lorosa'e dan Australia Menandatangani Kesepakatan Laut Timor dan Pertukaran Nota untuk menggantikan Rancangan 5 Juli 2001 antara UNTAET dan Australia. Substansi dari rancangan itu masih tetap dipertahankan. Kedua Perdana Menteri bertekad untuk bekerja sama untuk meratifikasi kesepakatan itu.
- 12 Juni: Kelompok-kelompok masyarakat sipil Timor Lorosa'e membentuk Kelompok Kerja Celah Timor, suatu koalisi untuk memonitor proses-proses legal perkembangan penyelesaian persoalan Laut Timor. Mereka mendesak Parlemen Timor Lorosa'e untuk tidak meratifikasi kesepakatan Laut Timor.
- 17 Juni: Pada Konferensi Minyak Lepas Pantai Asia Tenggara Australia di Darwin, Perdana Menteri Timor Lorosa'e dan Mari Alkatiri berjanji bahwa Kesepakatan Laut Timor "akan segera diratifikasi" karena kesepakatan itu memuat komitmen dan pengertian antara dua negara.
- 19 Juli: Negosiasi putaran pertama antara Timor Lorosa'e dan Australia mengenai kesepakatan unitisasi Internasional atas Sunrise (IUA - Internasional Unitization Agreement) menyimpulkan bahwa kedua belah pihak berjanji untuk mencapai kesepakatan pada akhir tahun 2002. Kesepakatan unitisasi Internasional akan menentukan bagaimana ladang Greater Sunrise dengan jumlah kandungan gas alam sekitar 9 triliun kubik (nilainya sekitar US\$16 miliar), akan dibagikan. Australia (kini diprediksikan akan mendapat 82% dari pendapatan Sunrise) telah menempatkan prioritas utama untuk mencapai kesepakatan ini agar proyek Sunrise dapat dilaksanakan.
- 17 Ag: Dewan Perdagangan dan perburuan Wilayah Bagian Utara Australia (The Northern Territory) mengadakan seminar tentang pengembangan Laut Timor di Darwin. Tiga LSM dari Timor Lorosa'e turut menghadiri konferensi ini: Konfederasi Sindikat Timor Lorosa'e (KSTL), Labor Advocacy Institute for East Timor – LAIFET dan Pusat Informasi Independen untuk Laut Timor (CIITT – Independent Center for Timor Sea Information).
- 24 Ag: Parlemen Nasional Timor Lorosa'e membuat Undang-undang tentang batas kelautan yang berasaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS. Timor Lorosa'e mengklaim Zona Eksklusif Ekonomi seluas 200 mil lepas pantai Timor Lorosa'e. Undang-undang ini juga meletakkan dasar untuk negosiasi-negosiasi batas kelautan dengan Indonesia dan Australia yang belum dijadwalkan.
- 9 Sep: Perdana Menteri Timor Lorosa'e, Mari Alkatiri dan para menteri lainnya mengunjungi Proyek Bayu-Udan, yang disambut oleh Phillips Petroleum.
- 17 Sep: Dewan Menteri Timor Lorosa'e mengesahkan Kesepakatan Laut Timor 20 Mei, dan kemudian diajukan ke Parlemen Timor Lorosa'e untuk diratifikasi.
- 3 Okt: Tiga perwakilan dari Masyarakat sipil Timor Lorosa'e (NGO Forum, CIITT dan *La'o Hamutuk*) memberikan kesaksian dihadapan Komite Kerja Gabungan untuk Pakta-pakta khususnya kesepakatan Laut Timor di Darwin. Tiga organisasi tersebut menghimbau kepada parlemen untuk tidak meratifikasi kesepakatan Laut Timor yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002, sebagaimana dilakukan oleh lebih dari 80 submisi yang diterima oleh komite kerja itu.
- Oct: Perundingan mengenai kesepakatan unitisasi Sunrise dilanjutkan. Australia dan Woodside ingin mengikut sertakan kesepakatan ini dalam ratifikasi kesepakatan Laut Timor, dengan demikian menanggulkan proyek Bayu-Udan (yang pada dasarnya menguntungkan Timor Lorosa'e) sebagai ganti atas konsesi pendapatan luar biasa dari Proyek Sunrise kepada Australia. Pemerintah Timor Lorosa'e dan Phillips Petroleum mendesak bahwa kedua kesepakatan tersebut harus ditangani secara terpisah.
- 11 Nop: Komite Kerja Gabungan parlemen Australia untuk pakta-pakta merekomendasi ratifikasi yang tuntas Kesepakatan Laut Timor dan perjanjian mengenai sunrise.
- 25 Nop. Parlemen Timor Lorosa'e memulai perdebatan mengenai kesepakatan Laut Timor.
- 27 Nop. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, se usai bertemu dengan Mari Alkatiri di Dili, mengatakan bahwa Australia tidak dapat meratifikasi kesepakatan Laut Timor sampai bulan Februari 2003 atau sesudahnya. Perusahaan-perusahaan perminyakan mengatakan bahwa penundaan itu dapat membahayakan usaha-usaha untuk menjual gas dari Bayu-Udan dan Sunrise, dan meningkatkan tekanan terhadap Pemerintah Timor Lorosa'e untuk bersedia menerima substansi unitisasi Sunrise yang secara tidak adil menguntungkan Australia, dari pada tetap mendesak untuk menegosiasikan batas-batas kelautan.
- 6 Des. Patner Sunrise, Woodside, ConocoPhillips, Shell dan Osaka Gas mengumumkan penundaan tetap mengenai proyek sunrise dan mengklaim bahwa proses pengolahan gas baik proses terapung di tenga laut/FLNG maupun proses melalui kanalisasi ke Darwin secara ekonomis adalah tidak menguntungkan. ❖

Kerusuhan di Timor Lorosa'e: Masyarakat Internasional Harus Bertanggungjawab

Pernyataan La'o Hamutuk (6 Desember 2002)

Kekerasan di Dili yang terjadi pada hari Selasa dan Rabu minggu ini merupakan peristiwa serius, yang berdampak signifikan bagi masa depan Timor Lorosa'e. Peristiwa tersebut juga memberikan signal yang jelas bagi isu-isu penting yang dihadapi oleh negara baru ini.

La'o Hamutuk menyatakan simpati kepada keluarga-keluarga dari orang-orang yang terbunuh dan kepada mereka yang terluka atau yang harta-bendanya dirusakkan. Dan kami percaya bahwa lembaga-lembaga dan badan internasional yang terlibat di Timor Lorosa'e, demikian juga pemerintah dan rakyat negeri ini, harus melihat baik kejadian tersebut dan tindakan-tindakan mereka serta mempelajari pelajaran bagi masa depan.

Pada saat ini, kami tidak tahu siapa yang mengarahkan massa, siapa yang lebih terlibat, atau rincian dari setiap peristiwa. Kebanyakan laporan media internasional mengenai kejadian-kejadian belum lama ini menjadi tidak akurat, terlalu disederhanakan atau menghasut, dengan berfokus pada reaksi-reaksi yang salah memberikan informasi dari para warga asing di Dili dari pada berpusat pada kejadian-kejadian yang sebenarnya. Selama tiga hari terakhir, *La'o Hamutuk* telah mengadakan pembicaraan dengan banyak warga Dili dan pengamat mengenai segala kejadian dimaksud. Kami tahu sedikit mengenai apa yang terjadi, dan ingin menawarkan sejumlah pengamatan awal dan rekomendasi.

Tidak ada huru-hara yang menyebar-luas, anarki atau kerusuhan sosial, yang terjadi di luar apa yang dapat ditahan oleh pihak-pihak berwenang. Sebaliknya, beberapa ratus orang digiring oleh para pemimpin politik pembangkang untuk menghancurkan harta-benda tertentu yang dipilih sebagai upaya untuk merongrong pemerintahan. Pihak-pihak berwenang publik yang bertanggungjawab gagal bertindak secara efektif, dan massa kemudian bergerak keliling Dili selama beberapa jam, dengan menghancurkan bangunan-bangunan simbolik Perdana Menteri atau barang-barang dari orang asing yang lebih kaya. Tidak pernah ada bahaya bagi publik; sesungguhnya hanya orang-orang yang mengalami luka serius adalah para demonstran yang tertembak, seperti yang dilaporkan oleh polisi.

Tentara Penjaga Perdamaian (PKF) dan polisi PBB (UNPOL) mendapat mandat atas hukum dan ketertiban di Timor Lorosa'e. Mereka bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan tidak hanya untuk fasilitas mereka sendiri, tetapi juga bagi semua bangunan dan masyarakat dari negeri ini. Polisi Nasional Timor Lorosa'e (TLPS), sebagaimana digambarkan oleh seorang peserta Misi Penilaian Gabungan Donor bagi UNMISSET-TLPS pekan silam "dewasa ini beroperasi di bawah wewenang eksekutif dari UNPOL. ... (TLPS) didukung oleh sumber daya (infrastruktur, peralatan, informasi dan keuangan) yang secara besar disediakan oleh UNPOL. TLPS dibimbing dalam manajemen dan operasinya pada tahap sementara oleh aturan-aturan yang dikembangkan oleh UNPOL." Walaupun TLPS melakukan kesalahan dan kurang mampu mengambil tindakan-tindakan efektif, UNMISSET dan masyarakat internasional masih bertanggungjawab.

La'o Hamutuk mendukung upaya-upaya damai, termasuk demonstrasi, untuk mempengaruhi pemerintah dan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga. Tentu saja kami tidak memaafkan kekerasan terhadap orang atau harta-benda. Selama 24 tahun perlawanan Timor Lorosa'e terhadap pendudukan Indonesia, perlawanan bawah tanah secara jelas mengetahui di mana letak keterbatasan-keterbatasan, dan menolak para provokator yang memaksakan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab atau keras. Di dalam era baru kemerdekaan demokratis Timor Lorosa'e ini, suatu generasi baru rakyat perlu mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut – dan seluruh penduduk, termasuk pemerintah perlu terlibat di dalam komunikasi dan konsultasi sehingga semua masyarakat benar-benar diwakili oleh para pemimpin terpilih mereka.

Pada hari Rabu, para siswa memprotes ketidak-pekaan polisi di dalam menangkap salah seorang teman kelas mereka sehari sebelumnya. Mereka membiarkan kemarahan mereka diprovokasi oleh keangkuhan polisi ke dalam kekerasan berskala kecil. Pada saat polisi bertindak berlebihan, mengancam dan kemudian menembak para siswa, kelompok siswa tersebut menjadi irasional, yang terbuka bagi manipulasi oleh para pemimpin politik pembangkang. Mereka kemudian bergabung dengan orang-orang tua dari masyarakat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan isu tersebut, dan memberikan arahan untuk menyerang sasaran-sasaran khusus, yang dimulai dengan parlemen dan toko Hello Mister, serta meluas ke toko-toko lainnya yang dimiliki oleh orang asing, fasilitas polisi, kawasan mesjid kampung Alor, suatu kantor kredit kecil yang diyakini berkaitan dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan rumah-rumah Mari Alkatiri dan saudaranya. Pengrusakan kecil-kecilan, kebanyakan batu-batu melalui jendela, dilakukan terhadap sejumlah bisnis sepanjang jalan yang dilewati oleh perusuh. Menjelang sore, setelah membakar rumah Perdana Menteri, kelompok tersebut membubarkan diri, dan Dili sejak saat itu kembali damai.

Hal ini bukan kekerasan yang acak. Dari informasi kami, pihak-pihak yang terluka, termasuk dua orang yang mengalami luka serius, dilakukan oleh polisi. Di kantor mikro kredit, kelompok tersebut memutuskan untuk menghancurkan dari pada membakar bangunan tersebut karena mereka tidak ingin risiko api dapat menyebar ke asrama susteran yang tidak jauh dari tempat itu. Di beberapa tempat, massa diminta untuk tidak menyerang bisnis asing atau kantor pemerintahan asing oleh orang-orang sipil dan petugas keamanan Timor Lorosa'e.

Tampak jelas bahwa tindakan polisi dapat menghentikan atau menghindari perusakan tersebut dengan sedikit risiko pada kedua belah-pihak. Tetapi hampir pada setiap kejadian, polisi tiba setelah pengrusakan selesai, sekalipun para perusuh berjalan kaki menempuh beberapa kilometer jauhnya, sementara pihak berwenang dilengkapi dengan helikopter, sepeda motor dan peralatan komunikasi yang canggih. Penyelidikan akan menentukan mengapa polisi dan PKF tidak mau atau tidak mampu menyikapi, tetapi jelas bahwa sekali lagi – seperti pada bulan Desember 1975 dan September 1999 – masyarakat internasional telah gagal dalam tanggungjawabnya terhadap masyarakat Timor Lorosa'e.

Kemarin, kami berbicara dengan para pemimpin komunitas Muslim di mesjid Kampung Alor. Sore hari sebelumnya, sedikitnya 100-200 orang yang mengamuk membawa bensin dan bom molotov telah mendatangi kawasan mereka. Karena takut, ratusan imigran Indonesia di Timor Lorosa'e berimpit-impitan dengan keluarga mereka di dalam mesjid, sambil menantikan kematian mereka sambil berdoa agar massa segera pergi. Setelah sejam membakar mobil, rumah-rumah dan toko di sekitarnya, dan dengan melemparkan batu melalui jendela mesjid, orang banyak tersebut kemudian pergi, hanya meninggalkan sejumlah orang luka ringan dari kaca yang beterbangan. Lebih dari satu jam kemudian, PKF Portugis muncul, dan sejak saat itu memberikan keamanan. Walaupun doa mereka kepada Allah dikabulkan, warga tersebut masih takut berjalan ke luar kompleks. Mereka meminta kepada mayoritas Katholik Timor Lorosa'e, seperti diwakili oleh pemerintahannya, untuk mempraktekan demokrasi dengan menghargai dan melindungi hak kaum minoritas Muslim akan kebebasan beragama.

Manipulasi yang mudah terhadap perusuh berasal dari kondisi sosial ekonomi yang mengakar: pengganguran besar-besaran, pendidikan yang buruk dan pelayanan publik lainnya; terbatasnya rasa saling respek antara pemerintah dan masyarakat sipil; frustrasi dengan kemajuan perkembangan demokrasi dan ekonomi; meluasnya tekanan pasca-konflik dan pasca-trauma, kurangnya kepercayaan pada proses perubahan yang damai. Masalah-masalah ini merupakan warisan dari berabad-abad kekuasaan penjajahan dan berdekade-dekade pendudukan militer. Tiga tahun pemerintahan UNTAET telah mencapai sejumlah kemajuan di dalam merespons segala permasalahan ini, tetapi masih jauh untuk dicapai dan tanggungjawab masyarakat internasional belum juga berakhir.

Berdasarkan pada pemantauan-pemantauan awal kami tersebut, *La' o Hamutuk* hendak menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut:

1. UNMISSET dan masyarakat internasional harus mengakui dan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan perdamaian bagi semua orang di Timor Lorosa'e, tanpa memprioritaskan fasilitas-fasilitas PBB dan pemerintahan asing.
2. UNMISSET dan masyarakat internasional harus memberikan dukungan yang efektif bagi polisi Timor Lorosa'e, terutama di dalam situasi di mana pasukan polisi Timor Lorosa'e tidak cukup berpengalaman untuk menanganinya secara efektif. Jadwal penarikan UNPOL dan PKF sebaiknya ditinjau ulang.
3. Pemerintah dan pihak-pihak berwenang independen sebaiknya secara lengkap menyelidiki guna mendirikan tanggungjawab atas kekerasan tersebut dan reaksi berlebihan dan tidak kompetennya pihak kepolisian. "Investigasi independen" selama 72 jam yang telah dimulai hari ini hanya akan mengais di permukaan.
4. Semua pelaku tindakan tak sesuai dengan hukum, termasuk anggota dari orang banyak dan juga mereka yang memancing serta polisi atau pihak lainnya yang menggunakan kekuatan secara berlebihan atau gagal mengemban kewajiban mereka, seharusnya diadili dan dihukum secara setimpal.
5. Segala komponen UNPOL dan TLPS, khususnya Unidade Intervensaun Rapida (Unit Gerak Cepat) dari TLPS dan mantan anggota kepolisian Indonesia seharusnya mendapatkan pelatihan dan aturan mengenai cara menangani orang banyak yang sulit dikendalikan tanpa harus menimbulkan ketegangan atau kekerasan. Ada kepercayaan yang meluas bahwa salah seorang siswa mati ditembak oleh salah seorang agen intelijen polisi, sehingga penggunaan operasi-operasi tanpa seragam di dalam situasi serupa seharusnya ditinjau ulang.
6. Masyarakat internasional harus meningkatkan komitmennya bagi Timor Lorosa'e untuk menyikapi segala sebab ketidak-senangan ekonomik, politik dan sosial yang mudah direkayasa ke dalam kekerasan. Bahkan jika Konferensi Negara-negara Donor Dili pekan depan ditunda, pemerintah-pemerintah asing harus memperbesar dukungan bagi keadilan, perkembangan ekonomi dan demokrasi politik di Timor Lorosa'e, suatu negeri yang hidup kembali setelah selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan asing untuk memulihkan dirinya.
7. Kami mendesak wartawan asing dan pihak-pihak lainnya untuk lebih bijaksana, sehingga menghindari pelaporan-pelaporan yang berisi rumor atau bahaya kekerasan yang dilebih-lebihkan. ❖

Siapa itu La' o Hamutuk?

Staf La' o Hamutuk: Cassia Bechara, Thomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvenal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Adriano do Nascimento, Terry Russell, Charles Scheiner, Pamela Sexton, Jesuina (Delly) Soares Cabral, João Sarmento, Andrew de Sousa

Penerjemah: Antonio Lopez

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Aderito de Jesus Soares

La' o Hamutuk berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

Di bulan Agustus, La'o Hamutuk menerbitkan dua artikel tentang bantuan Jepang dan tenaga listrik. UNDP mengirimkan surat kepada kami, yang dicetak secara penuh dalam Buletin ini. Tanggapan kami berada di halaman selanjutnya. La'o Hamutuk berkomitmen untuk memberikan informasi yang paling lengkap dan akurat yang tersedia.

The Editor
Buletin La'o Hamutuk
East Timor Institute for Reconstruction Monitoring & Analysis
Dili

Kepada Editor:

Buletin anda bulan Agustus 2002 memuat artikel tentang bantuan Pemerintah Jepang kepada Timor Lorosa'e dan sektor kelistrikan di Timor Lorosa'e. UNDP adalah salah satu saluran/jaringan utama bagi bantuan Pemerintah Jepang kepada Timor Lorosa'e, termasuk sektor kelistrikan, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan beberapa kesalahan dan kesalahpahaman dalam artikel-artikel anda.

Bantuan Pemerintah Jepang Kepada Timor Lorosa'e

1. Daftar anda tentang proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai Pemerintah Jepang adalah tidak lengkap dan dana-dana proyek yang anda cantumkan juga tidak tepat. Di bawah ini adalah sebuah daftar yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur bantuan Jepang yang dikelola oleh UNDP dan UNOPS mewakili, dan bekerja sama yang erat dengan instansi yang relevant/terkait di dalam pemerintahan Timor Lorosa'e.

Tahap pertama (ditandatangani bulan Juli 2000)

- Proyek Air Bersih Dili, bagian 1 (sedang berlangsung): \$11.280.000
- Proyek Jalan Dili-Ainaro-Cassa (telah selesai): \$4.700.000
- Proyek Irigasi Laclo, bagian 1 (telah selesai): \$2.737.415
- Proyek Listrik Pedesaan (telah selesai): \$1.912.000
- Proyek Stasiun Listrik Comoro (telah selesai): \$4.200.585
- Proyek Pelabuhan Dili, bagian 1 (telah selesai): \$2.650.000

Tahap kedua (ditandatangani bulan Mei 2002)

- Proyek Pelabuhan Dili, bagian 2 (mulai bulan Juli 2002): \$2.999.000
- Proyek Air Bersih Dili, bagian 2 (mulai bulan Juli 2002): \$2.361.000
- Proyek Air Bersih Kabupaten, bagian (mulai bulan Juli 2002): \$2.405.000
- Proyek Irigasi Laclo, bagian 2 (mulai bulan Juli 2002): \$6.129.000
- Proyek Politeknik Hera (mulai bulan Juli 2002): \$4.670.000

Nilai keseluruhan dari proyek-proyek tersebut adalah \$46.044.000

Informasi terperinci tentang proyek-proyek ini dapat diperoleh dari UNDP dan UNOPS pada setiap saat.

2. Pejabat-pejabat dari Pemerintah Timor Lorosa'e cukup banyak terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut. Pejabat-pejabat tingkat kabinet atau Direktur-direktur Generalnya memimpin rapat-rapat Komite Koordinasi Proyek, sementara Direktur-direktur Departemen memimpin rapat-rapat Komite Kerja Proyek yang diadakan setiap dua minggu. Keputusan dalam kedua komite tersebut diambil melalui kesepakatan bersama. Kedutaan Besar Pemerintah Jepang dan JICA (serta UNDP dan UNOPS) **tidak** membuat keputusan-keputusan secara sepihak mengenai proyek-proyek tersebut; Semua keputusan diambil secara kolektif dalam komite yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Timor Lorosa'e. Selain itu, kerap kali ada pertemuan-pertemuan ad hoc antara staff lokal proyek dari UNDP dan UNOPS dan rekan-rekan dari tingkat pemerintah, tingkat kabupaten dan masyarakat.

Seusai dengan isi Memorandum Kesepakatan (ditandatangani oleh wakil dari CNRT pada Bulan Juli tahun 2000 dan para menteri dari ETPA di Bulan Mei 2002), UNOPS bertindak sebagai agen pelaksana untuk semua proyek, sedangkan UNDP mengisi/menempati fungsi monitoring. UNDP dan UNOPS **secara bersamaan** menerima 6% biaya pengelolaan untuk menutupi biaya-biaya administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan proyek mewakili Pemerintah Timor Lorosa'e. Biaya yang dikenakan ini termasuk lebih rendah dari biaya administrasi yang umumnya dikenakan oleh agensi pelaksana di seluruh dunia. Perlu kami tekankan bahwa biaya administrasi yang dimaksud merupakan dana tambahan atas dana pokok kegiatan proyek yang dimaksud; untuk lebih jelasnya biaya administrasi ini tidak diambil dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan proyek.

3. Anda menyebutkan jaringan distribusi listrik yang tidak memadai di sub district Iliomar di District Lautem. Sebenarnya pada fase design dari proyek rehabilitasi sentral pembangkit listrik, memang terdapat jaringan distribusi yang cukup memadai. Namun, sangat disayangkan bahwa akibat dari tindakan pengrusakan dan pencurian yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya telah mengubah situasi

semula dan telah membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat. Lebih lanjut, di tahun 2001, ETPA mengumumkan bahwa ia dapat memikul tanggung jawab atas jaringan distribusi pedesaan di sub distrik.

4. Keengganan anda untuk menyebutkan beberapa manfaat dari proyek ini dan proyek-proyek lain yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang, adalah memalukan. Saya menyarankan anda mewawancarai anggota masyarakat dan para pekerja lokal yang mengambil keuntungan dari para proyek ini, begitu juga para menteri dan pejabat Pemerintah Timor Lorosa'e yang lain.

Sektor Kelistrikan di Timor Lorosa'e

1. "Laporan khusus tentang Listrik" anda mengandung sejumlah kesalahan, omisi, salah persepsi, dan akibatnya analisa yang salah (lihat dibawah). Anda telah menyatakan tanpa bukti bahwa "sulit untuk mendapatkan informasi tentang EDTL" dan anda hanya mewawancarai dua pegawai dari EDTL dalam perjalanan investigasi anda. Dalam kenyataan, ada sejumlah besar informasi yang tersedia mengenai sektor pelistrikan dari berbagai sumber, khususnya dari sejumlah kementerian dan department pemerintahan, negara donor, agen-agen pelaksana, badan-badan pembangunan, para pengusaha dan sejumlah penasehat pemerintah yang kesemuanya perduli tentang masalah pelistrikan ini. Sesungguhnya, sudah terbentuk sebuah panitia koordinasi di bidang pelistrikan, yang terdiri dari pejabat-pejabat dari Kementerian Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Kehakiman, PMU, wakil-wakil dari sektor swasta, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNDP, UNOPS, UNMISSET dan para penasehat dari JICA dan penasehat serta pakar yang lain, yang bertemu setiap dua minggu sekali. Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun wakil dari badan atau instansi tersebut diatas diminta pendapatnya dalam penyusunan laporan anda.

2. Karena banyaknya permasalahan yang muncul sekarang ini dalam bidang pelistrikan, laporan anda memang tepat waktu. Tetapi, sangat disesalkan bahwa penyelidikan anda mengabaikan berbagai macam krisis jangka pendek dan menengah yang sebenarnya sedang dihadapi sektor pelistrikan. Kelalaian ini telah menyebabkan banyak kesalahan dalam laporan anda.

Harga minyak yang tinggi hanyalah salah satu dari krisis saat ini dalam sektor pelistrikan. Masalah-masalah yang didokumentasi dengan baik lainnya, termasuk, antara lain, (i) krisis pengelolaan serta sumber daya manusia dalam badan EDTL, (ii) kurangnya pemeliharaan dari generator-generator serta mesin lainnya, menyebabkan mesin-mesin itu dapat bekerja dengan baik dan kepadaman (iii) tingginya tingkat kehilangan serta pencurian tenaga listrik di Dili, dan (iv) adanya kegagalan dalam sistim penagihan yang menyebabkan hampir 90% rumah tangga pemakai tidak pernah membayar .

Banyak dari organisasi serta individual tersebut sedang bekerjasama untuk berusaha mencari sebuah jalan keluar untuk masalah-masalah tersebut dan juga masalah yang lain. Beberapa organisasi multilateral yang lain juga sedang memberikan kontribusi sumber daya yang cukup berarti untuk membantu pemerintah dalam menyusun suatu strategi pembangunan jangka menengah dan panjang untuk sektor pelistrikan dan juga memberikan usulan-usulan yang sekiranya dapat dipakai untuk mengurangi krisis jangka pendek yang sedang dihadapi.

3. Laporan anda sangat salah mengartikan sifat dari bantuan Jepang untuk sektor kelistrikan. Jepang telah membiayai dua proyek rehabilitasi darurat dalam sektor ini, satu di antaranya ditargetkan untuk stasiun pembangkit di 13 kecamatan di daerah-daerah rural (bernilai US\$1.912.000), yang lainnya menyangkut perbaikan generator-generator di pembangkit Comoro di Dili seharga US\$ 4,200,585, **bukan** US\$ 478,000 seperti dinyatakan dalam laporan anda. Proyek-proyek ini hanya melibatkan rehabilitasi atau penggantian komponen padat. Biaya untuk proyek-proyek ini **tidak** diperuntukkan untuk membiayai seluruh pusat kendali listrik di negara ini," seperti yang anda duga, dan biaya tersebut **bukan** pula untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dari EDTL. Pemerintah Jepang tidak menangani stasiun listrik di 13 kecamatan seperti yang anda duga. Pemerintah Timor Lorosa'e, melalui EDTL, memiliki serta menjalankan stasiun listrik-stasiun listrik ini serta stasiun listrik-stasiun listrik lainnya di Timor Lorosa'e. Akhirnya, proyek pembangkit listrik Comoro yang dibiayai oleh Jepang melibatkan perbaikan empat dari kelima generator yang awalnya terdapat di pusat pembangkit listrik, **bukan** untuk memberikan generator yang berkapasitas 1 MW, seperti dugaan anda.

Proyek-proyek ini **tidak** "dikendalikan oleh pemerintah Jepang, UNDP dan UNOPS dari awal sampai selesai," seperti yang anda tuntutan. CNRT adalah satu dari penanda tanganan Perjanjian Persetujuan yang berhubungan dengan proyek-proyek ini, dan ETPA serta ETTA telah terlibat langsung dalam kemajuan proyek. Seperti Sdr. Virgilio Guterres dari EDTL yang mungkin telah menerangkan kepada anda, beliau dan pendahulunya, Sdr. Filomeno de Andrade, keduanya memimpin pertemuan-pertemuan baik di Komite Koordinasi Proyek (PCC) maupun di Komite Kerja Proyek (PWC) untuk ke-sekian kalinya sepanjang masa proyek.

Satu-satunya proyek terbesar di luar Dili **bukan** dibiayai atas kerjasama bilateral oleh Jepang atau Portugal, seperti dugaan anda melainkan oleh para donor TFET melalui Proyek Rehabilitasi Darurat Infrastruktur (EIRP) yang diatur oleh PMU dari Pemerintah (sebelumnya oleh PMU dari ADB). Proyek ini melibatkan rehabilitasi 15 pembangkit listrik di kabupaten dan kecamatan. Tidak disebutkan pekerjaan EIRP dalam Laporan Khusus anda tentang Listrik adalah suatu kilauan kelalaian.

4. Kartun dalam halaman 7 dari buletin yang bermasalah menggambarkan UNDP, UNOPS dan Kementerian Keuangan lagi mencuri dana yang diperuntukkan bagi pekerjaan sektor kelistrikan. Tak perlu dibilang, ini semua adalah bohong – dan fitnahan – cara memerangkan ketentuan-ketentuan dari UNDP, UNOPS serta Pemerintah Timor Lorosa'e. Akhirnya, kartun anda di halaman 10 dari buletin menunjukkan suatu sikap kecemasan dari pihak La'o Hamutuk terhadap ketentuan-ketentuan bantuan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Mensubsidi listrik bebas sebagai suatu arti bagi dirinya sendiri merupakan suatu pemakaian dana yang tidak berkelanjutan dan tidak menyenangkan untuk meringankan kemiskinan atau mempromosikan pemerintahan yang baik.

Terima kasih banyak.

Hormat saya,

Haoliang Xu, Senior Deputy Resident Representative, UNDP

Tanggapan *La' o Hamutuk* terhadap Surat UNDP

La' o Hamutuk menilai semua komentar, koreksi dan klarifikasi mengenai pemberitaan kami dan kami haturkan terima kasih kepada Mr. Haoliang Xu dari UNDP atas kesediaannya dalam membantu pekerjaan kami. Kami telah memperoleh informasi yang bermanfaat dari surat anda dan tentunya kami akan selalu berhubungan dengan kantor anda di masa yang akan datang jika kami masih tetap memantau proyek-proyek internasional yang kelolah oleh UNDP. Kami menyadari bahwa beberapa informasi yang kami publikasikan sudah kadaluwarsa atau tidak akurat lagi.

Kegiatan investigasi *La' o Hamutuk* selalu mendapat tantangan, dan investigasi-investigasi tersebut termasuk bantuan bilateral Jepang dan tak terkecuali bantuan pada sektor kelistrikan. Penyaluran bantuan Jepang melalui UNOPS dan UNDP kepada kontraktor-kontraktor (biasanya dialihkan ke sub-kontraktor) dengan keterlibatan sarana-sarana operasional Bank Dunia, ADB, JICA dan UNMISSET terdapat suatu sistem hubungan yang rumit antara berbagai lembaga internasional dan lembaga-lembaga asing. Kami sering mengalami kesulitan untuk mengetahui lembaga mana yang memiliki data-data yang akurat. Dalam kasus ini, kami percaya bahwa Pemerintah Jepang dan Timor Lorosa'e mungkin memiliki angka-angka terbaru, namun kami keliru. Sayangnya, tidak satupun dari lembaga-lembaga yang membimbing kami ke UNDP atau ke lembaga lainnya ketika kami sedang mengkonfirmasi data-data dimaksud untuk Bulletin kami.

Sebelum publikasi, kami telah memberikan draft artikel itu ke JICA dan Kedutaan Besar Jepang, namun mereka tidak dapat mengembalikannya kepada kami dalam kurung waktu dua minggu sebelum kami mempublikasikannya. Dalam upaya untuk membuat investigasi lebih akurat, *La' o Hamutuk* hampir selalu meminta kepada penulis-penulis artikel untuk merevisi artikel-artikel tersebut sebelum kami publikasikan. Dalam kasus ini, mungkin kami juga harus menanyakan kepada UNDP.

Juga kami selalu mendapat kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat dari beberapa lembaga (liha editorial, halaman belakang). Ketika kami mulai mencari data-data mengenai sektor listrik pada Januari 2002, kami melakukan pendekatan dengan UNDP beberapa kali, namun kami tidak mampu untuk mendapat informasi yang dibutuhkan; staf internasional yang kami hubungi adalah orang baru dan tidak ada seorangpun yang hendak memberikan informasi kepada kami. Sekarang ini kami merasa senang karena menjaling kerjasama yang lebih baik dengan UNDP, dan kami tetap berterima kasih kepada individu-individu dan lembaga-lembaga yang berkehendak baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik kami. Persoalan lain yang muncul adalah akibat persoalan bahasa karena dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga internasional hanya ditulis dalam bahasa Inggris dan staf internasional tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa lokal. Oleh karenanya, *La' o Hamutuk* dengan peneliti local dan internasional yang berpengalaman selalu mengalami kesulitan dalam memperoleh data-data yang akurat dan dapat dimengerti maka bukan suatu keraguan bahwa orang Timor Lorosa'e lainnya akan mengalami kesulitan sama untuk memperoleh informasi mengenai pembangunan negara mereka sendiri.

Terdapat hasil-hasil yang sangat berarti dari proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah Jepang demikian juga pemerintah-pemerintah lainnya, namun, apabila proyek-proyek tersebut tidak melibatkan, menguntungkan dan atau memberdayakan orang-orang Timor Lorosa'e secara tepat maka kita harus menguji masalah-masalah tersebut sebagai masalah masyarakat. Sayangnya, beberapa orang Timor Lorosa'e di Departemen kelistrikan Timor Lorosa'e (termasuk direktornya, Virgilio Guterres) merasa bahwa konsultasi dengan orang Timor Lorosa'e belum memadai. Mereka mempertahankan bahwa orang Timor Lorosa'e dengan latarbelakang di bidang listrik yang terlibat dalam perencanaan sektor listrik hanyalah "orang Timor Lorosa'e yang datang dari luar negeri" yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana jalannya listrik selama periode Indonesia. Sumber-sumber tersebut menuntut konsultasi yang lebih dalam dengan orang Timor Lorosa'e yang bekerja "di lapangan" dan mengharapkan bahwa pejabat-pejabat pemerintah Timor Lorosa'e harus menampilkan diri lebih dari fungsi "pemberi izin" dalam keputusan-keputusan mengenai Tenaga Listrik Timor Lorosa'e.

Disayangkan sekali bahwa bantuan Jepang tidak selalu mencapai tujuan-tujuannya. Karena terdapat banyak pihak yang terlibat dalam sector pengadaan listrik di Timor Lorosa'e, maka persoalan-persoalan itu tidak dapat dibebankan kepada Jepang atau organisasi mana saja, sebagaimana ditulis di artikel kami, salah satu contoh adalah stasiun tenaga listrik di Iliomar. Orang-orang illiomar baru-baru ini mengklaim bahwa tidak ada vandalisme yang terjadi di pusat tenaga listrik di sub-distrik tersebut kecuali yang dilakukan oleh milisi pada 1999 sebelum proyek-proyek jepang dimulai. Mereka menyatakan bahwa Iliomar belum mempunyai listrik, sementara bantuan Jepang telah memberikan dua buah generator namun tidak ada kabel dan juga tidak ada tiang-tiang untuk menyambung kabel dari rumah ke rumah.

Investigasi kami di sektor kelistrikan lebih terfokus pada bagaimana orang Timor Lorosa'e baik di dalam lembaga-lembaga maupun dalam masyarakat mengerti dan terlibat dengan proyek-proyek tersebut, dan sebagaimana disebut di atas, bahwa kami janji untuk mencari informasi dari institusi-institusi dan badan-badan lainnya di masa yang akan datang. Kartun yang ditulis oleh UNDP sebagaimana diperlihatkan "perasaan kuatir terhadap peran pengawasan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang", dari perspektif kami, adalah suatu refleksi dari persoalan-persoalan yang dimiliki oleh beberapa orang Timor Lorosa'e tentang kemana perginya dana pembangunan. Namun kami benar-benar mengakui bahwa kartun kedua tidak semestinya menggambarkan situasi sekarang ini. Kami menyesal atas implikasi "hilangnya/pencurian" dana dan seharusnya memperlihatkan uang yang tertukar di depang rakyat dan bukan di belakang mereka.

La' o Hamutuk akan tetap meneliti baik bantuan Jepang kepada Timor Lorosa'e maupun pembagnunan di sektor listrik. Kami mengakui bahwa banyak investigasi yang perlu dilakukan dan kami sangat menghargai bantuan dari semua pihak dalam menuntaskan kerja yang kami lakukan. ❖

Berita Singkat ...

Pada tanggal 8 Oktober, Kelompok Kajian Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (LKI), suatu koalisi LSM setempat, menyelenggarakan suatu seminar tentang Timor Lorosa'e yang belum lama berselang bergabung dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia. Para panelis yang terdiri dari wakil-wakil LKI, masyarakat sipil Timor Lorosa'e, dan Pemerintah mendiskusikan apa yang telah dicapai di Timor Lorosa'e, dan kemungkinan keuntungan dan bahaya di masa depan. Ringkasan lengkap dari seminar tersebut dapat dibaca pada situs *La'o Hamutuk* di www.etan.org/1h.

Pada tanggal 12 November 2002 — Pemerintah Timor Lorosa'e menyelenggarakan peristiwa peringatan untuk memberikan penghormatan kepada ratusan pemuda Timor Lorosa'e yang dibantai di dalam pemukiman Santa Cruz oleh tentara pendudukan Indonesia di 1991. Selama peringatan tersebut *Masyarakat Timor Lorosa'e untuk Pengadilan Internasional*, suatu koalisi LSM, sekali lagi mendesak PBB untuk mendirikan suatu pengadilan internasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan terhadap Timor Lorosa'e selama pendudukan Indonesia, termasuk para pelaku pembantaian 12 November. Menurut kelompok ini, sudah saatnya bagi PBB mendirikan pengadilan tersebut karena pengadilan HAM ad hoc di Jakarta telah gagal dan tidak dapat menghasilkan rasa keadilan bagi Timor Lorosa'e. Kelompok

tersebut juga melakukan pawai keliling kota Dili dengan mengenakan masker dan membawa gambar-gambar Gerard Ford, Henry Kissinger, Gough Whitlam, Soeharto, Benny Moerdani, Wiranto, Prabowo, etc. yang mendalangi pelanggaran HAM selama 24 tahun di Timor Lorosa'e.

Pada bulan Oktober, Program Pemantau Sistem Judisial/JSMP, sebuah LSM Timor Lorosa'e melaporkan tentang hak banding. Dalam analisis mereka setebal 23 halaman JSMP menyatakan bahwa walaupun "hak banding merupakan salah satu komponen utama dari hak tersangka untuk suatu peradilan yang adil, tetapi...belum memungkinkan untuk melakukan hak banding di Timor Lorosa'e selama hampir satu tahun". Mereka mempersalahkan tidak berfungsinya pengadilan tinggi karena tidak ada perencanaan oleh UNTAET dan departemen kehakiman Timor Lorosa'e untuk pengadilan dimaksud serta buruknya koordinasi antara kedua institusi ini. JSMP menginginkan aplikasi hak asasi manusia yang bertaraf internasional termasuk hak banding karena lebih banyak tekanan terhadap system judisial negara Timor Lorosa'e. Mereka merekomendasikan satu langkah urgen untuk membentuk pengadilan tinggi yang memberikan pelayanan proses judisial dan administrasi baik kebutuhan peradilan maupun pengadilan tinggi agar berfungsi dengan baik. Laporan selengkapnya ada di www.jsmp.minhub.org/resources.htm#reports ❖

Demokrasi perlu Informasi *(sambungan dari halaman 20)*

sudah sangat terlambat untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Informasi yang kurang mendasar disembunyikan oleh pegawai negeri pada segala tingkat, karena takut pada para pengawas mereka. Donor-donor internasional, agen-agen multilateral, dan pemerintah-pemerintah asing menjaga rahasia-rahasia yang menjadi konsumsi publik seturut prosedur mereka sendiri atau di dalam negara mereka sendiri—akan tetapi yang di Timor Lorosa'e tidak akan disiarkan tanpa izin Pemerintah.

Salah satu tolok ukur demokrasi ialah pemerintahan dengan izin dari yang diperintah. Bagaimana mungkin yang diperintah—rakyat Timor Lorosa'e—memberikan izin yang diinformasikan jika kita tidak mengetahui apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah kita? Adalah penting bahwa rakyat Timor Lorosa'e dapat memberikan masukan bermanfaat sebelum segala keputusan diambil. Ini berbeda dengan "sosialisasi" yang dipraktekkan oleh kediktatoran dan "konsultasi" yang diterapkan di dalam demokrasi.

Setiap orang di Timor Lorosa'e sedang mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Para Menteri kita belum pernah menjadi Menteri-menteri sebelumnya; anggota Parlemen kita belum pernah menjadi Parlemen; pegawai negeri kita tidak pernah bekerja bagi suatu pemerintahan yang demokratis; wartawan kita belum pernah menikmati kebebasan pers; warga negara kita belum pernah mengalami demokrasi. Sebagaimana kita memerankan peranan-peranan baru ini, kita belajar sejumlah hal dari para konsultan, pelatihan dan pembangunan kecakapan — tetapi yang lebih penting, mempertahankan pelajaran dari pengalaman biasa kita, membagikan pengetahuan kita serta belajar dari satu sama lain.

Hal ini akan terlaksana jika informasi disalurkan secara bebas, dan mereka yang memegang jabatan kekuasaan menghormati pengalaman-pengalaman dan pandangan dari yang lainnya di dalam masyarakat. Lebih sering, para konsultan asing

menyiapkan proposal yang dibahas secara rahasia oleh Dewan Menteri, yang hanya akan menjadi publik setelah usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan, dikirimkan kepada Parlemen, dan kemudian dibocorkan oleh Anggota Parlemen.

Bagaimana para Menteri mengetahui bahwa rakyat berpikir jika rakyat tidak tahu-menahu tentang apa yang tengah dipertimbangkan oleh para Menteri? Bagaimana mungkin Parlemen dapat mewakili para pemilih jika baik Parlemen maupun para pemilih terperosok di dalam gelap gulita hingga perundang-undangan tersebut disampaikan untuk segera diluluskan?

Jika kabar burung bisa dijual untuk mendapatkan uang, Timor Lorosa'e bisa jadi merupakan sebuah negara yang kaya-raya. Tetapi Timor Lorosa'e akan tetap miskin dalam demokrasi jika media (termasuk *La'o Hamutuk*) dan khalayak memiliki fakta-fakta yang perlu bagi informasi yang akurat, pelaporan dan komentar. Jika tidak, rakyat akan menjadi bingung dan pemerintah akan memboroskan waktu dan tenaga yang berharga untuk membantah segala laporan palsu atau meluruskan segala gagasan yang tidak mendapatkan informasi.

Kurangnya transparansi dan tertutupan yang mengakar sehingga perlu disikapi pada tingkat pimpinan. Kami mendesak Perdana Menteri untuk mengarahkan bawahan-bawahannya, dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan pemerintahannya, bahwa semua informasi harus dianggap publik jika tidak ada alasan-alasan mendesak yang spesifik seperti keamanan atau rahasia pribadi, karena hal itu tidak boleh terjadi. Hal ini tidak hanya memudahkan *La'o Hamutuk* untuk melakukan pekerjaan kami memantau lembaga-lembaga internasional yang aktif di Timor Lorosa'e, tetapi secara berarti akan memperkuat landasan demokrasi dan stabilitas jangka panjang dari Republik Demokratik Timor Lorosa'e. ❖

Editorial: Demokrasi Perlu Informasi

Sebagai sebuah negara baru, Timor Lorosa'e sedang menciptakan struktur, undang-undang, peraturan serta prosedur guna mendefinisikan cara kerja pemerintah, pelayanan yang diberikan kepada warganya serta tanggungjawab warga negara terhadap pemerintahan tersebut. Kendatipun Konstitusi kita yang baru meletakkan kerangka bagi administrasi pemerintah, raga, darah dan kulit dari Republik Demokratik Timor Lorosa'e baru saja dirancang. Banyak keputusan yang telah ditempuh antara 20 Mei dan akhir 2002 akan memiliki efek-efek yang lama bagi rakyat Timor Lorosa'e.

Konsekwensinya, vital bagi publik Timor Lorosa'e agar dapat mengambil bagian di dalam keputusan-keputusan ini. Rakyat kita telah mengalami abad-abad kekuasaan otokratik yang lama, yang di dalamnya segala gagasan kita tak berarti apa-apa. Sekarang kita sedang memerintah diri kita sendiri, gagasan-gagasan kita sangat penting untuk membuat pemerintah kita demokratis, dan segala gagasan tersebut harus sedapat mungkin diinformasikan dan dipertimbangkan dengan baik. Masyarakat sipil Timor Lorosa'e seharusnya berpartisipasi penuh di dalam berbagai perdebatan mengenai segala tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah dan Parlemen kita, dan untuk melakukan hal itu kita membutuhkan informasi yang baik tentang apa yang sedang dipertimbangkan. Sayangnya, informasi serupa terkadang tidak disampaikan kepada publik hingga keputusan-keputusan dicapai.

Selama enam bulan sejak Timor Lorosa'e menjadi merdeka, *La'o Hamutuk* telah menemukan lebih dari selusin contoh di mana pegawai negara atau lembaga internasional tidak bisa mengeluarkan informasi tanpa persetujuan lebih dulu dari Perdana Menteri atau bawahan-bawahannya yang bertingkat tinggi. Kami tidak mendaftar contoh-contoh spesifik karena kami tidak ingin memermalukan orang-peorangan tertentu yang hanya mengikuti contoh atau arahan dari yang lain, tetapi hal itu merupakan suatu pola yang meluas:

- ✓ Agen-agen internasional mulai menggunakan alasan ini untuk mengelak transparansi mengenai kegiatan mereka, bahkan jika persetujuan dari pemerintah RDTL tidak sungguh diperlukan.
- ✓ Rancangan perundang-undangan dan lembaran-lembaran kebijakan tidak tersedia sebelum disetujui oleh Dewan Menteri.
- ✓ Kontrak-kontrak hibah dengan pemerintahan asing disensor oleh kantor pemerintah Timor Lorosa'e yang menerima dana tersebut.
- ✓ Bahkan kesepakatan hukum antara pejabat Timor Lorosa'e dengan agen-agen pemerintahan asing – yang ditanda-tangani dan telah berlaku – kadang-kadang masih dirahasiakan. Sebagai contoh, Status Kesepakatan Misi dan Tentara antara UNMISSET dengan Pemerintah Timor Lorosa'e, yang mendefinisikan tanggung-jawab, kewenangan, dan situasi hukum tentara PKF di Timor Lorosa'e yang sesuai dengan Markas Besar PBB “tidak disebarakan kepada umum.”

Budaya kerahasiaan pemerintah ini memiliki sejarah yang panjang di Timor Lorosa'e, akan tetapi belum lama berselang semakin menyolok di bawah Pemerintahan Peralihan PBB di Timor Lorosa'e. Di bulan Desember 2000, UNTAET memberitahukan kepada seluruh personel Timor Lorosa'e dan

internasional bahwa “tidak satu pun informasi, yang merupakan interen Organisasi tersebut dapat dikeluarkan, didistribusikan dan disiarkan melalui cara apa pun, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kepala Misi dan / atau Direktor Administrasi; dan personel tertentu tidak semestinya mengkomunikasikan kepada pihak lain di luar Misi informasi tertentu yang diketahui oleh mereka dengan alasan pelayanan mereka bersama dengan Misi, jika tidak diizinkan secara tertulis untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari kewajiban mereka. ...” (Lihat *Buletin LH* Vol. 1, No. 4 “Berita Singkat”)

Malangnya, pola kerahasiaan yang dibentuk selama pemerintah PBB yang tidak bertanggungjawab telah ikut terbawa ke dalam Timor Lorosa'e yang kini merdeka. Hal ini merupakan suatu pola yang memiliki implikasi buruk bagi demokrasi.

Pasal 40 Konstitusi Republik Demokratik Timor Lorosa'e menjamin “Setiap orang memiliki ... hak untuk memberikan informasi serta diberitahu informasi secara tidak memihak.” Pasal 41 memberikan kepada wartawan “akses pada sumber-sumber informasi.” Akan tetapi hak dan akses serupa telah lebih sering menjadi perkecualian dari pada aturan.

Rancangan perundang-undangan, peraturan dan naskah kebijakan disembunyikan dari media dan publik sebelum semuanya disetujui oleh Dewan Menteri, yang pada saatnya

(Bersambung ke halaman 19)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e-internasional yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses rekonstruksi/pembangunan dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif dalam rekonstruksi dan pembangunan negeri ini. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara komunitas internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf Timor Lorosa'e dan staf internasional *La'o Hamutuk* mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* adalah pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan/atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e dan komunitas internasional.